

**ANALISIS RENDAHNYA REALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI  
KEBERSIHAN/PERSAMPAHAN PADA DINAS PENDAPATAN  
DAERAH KOTA PALEMBANG**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



**OLEH :**

**NAMA : MARYUNANI**

**NIM : 22 2003 177**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS EKONOMI**

**2008**

## **PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maryunani

NIM : 22 2003 177

Jurusan : Akuntasi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

~~Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai yang berlaku.~~

Palembang, 23 Juli 2008



Maryunani



**Fakultas Ekonomi  
Universitas Muhammadiyah  
Palembang**

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

**JUDUL : ANALISIS RENDAHNYA PENERIMAAN RETRIBUSI KEBERSIHAN DAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PALEMBANG**

**Nama : MARYUNANI**  
**Nim : 22 2003 I77**  
**Fakultas : Ekonomi**  
**Jurusan : Akuntansi**  
**Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Pemerintahan**

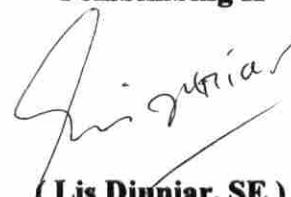
**Diterima dan disyahkan  
Pada Tanggal, 20/08/2008**

**Pembimbing,**

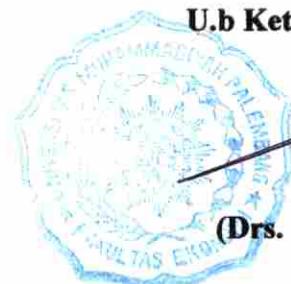
**Pembimbing I**

  
( Drs. Sunardi, SE. M.Si )

**Pembimbing II**

  
( Lis Djuniar, SE )

**Mengetahui,  
Dekan  
U.b Ketua Jurusan Akuntansi**



**(Drs. Sunardi, SE. M.Si)**

*Motto dan Persembahan*

*“Dan Janganlah Kamu (Merasa) Lemah, dan Jangan (Pula) Bersedih Hati, Sebab Kamu Paling Tinggi (Derajatnya) Jika Kamu Orang Beriman.”*

*(Al Qur'an Surat Ali Imran:139)*

*“Dibalik Kesulitan Pasti Ada Kemudahan, Janganlah Kita Berputus Asa Karena Orang Yang Berputus Asa Adalah Orang Yang Lemah”*

*“Sesungguhnya Orang Yang Sukses Dalam Hidupnya Adalah Orang Yang Bijak Dalam memetik Hikmah Dari Setiap Kegagalan.”*

*“Kunci Kesuksesan di Akhirat Adalah Sabar dan Syukur, Kunci Kesuksesan di Dunia Adalah Doa dan ikhtiar.”*

*(Maryunani)*

*Kupersembahkan kepada:*

- *Orangtuaku Tercinta*
- *Saudara-Saudariku*
- *Para Pengajar dan Pendidikku*
- *Special Someone*
- *Sahabat-Sahabatku*
- *Almamaterku*



اَسْمَوَ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

## PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran allah SWT. Dengan izin-NYA jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sederhana ini sebagai syarat bagi mahasiswa untuk menyelesaikan studinya pada suatu perguruan tinggi, serta salawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berhasil menyampaikan risalahnya.

Skripsi ini berjudul **“Analisis Rendahnya Realisasi Penerimaan Retribusi Kebersihan/Persampahan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang”**, Alhamdulilah dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak memperoleh bantuan baik berupa bimbingan, pengarahan, masukan, saran dari pembimbing, oleh karena itu dalam kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak H. M. Idris SE, MSi. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta Staf dan Karyawan/i.
2. Bapak Drs. H. Rosyadi, MM. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi beserta Staf dan Karyawan/i.
3. Bapak Drs. Sunardi, SE. MSi. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi dan Pembimbing Akademik yang telah memberikan dorongan dan motivasi serta bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
4. Bapak M. Irfan Tarmizi, SE. Ak. MBA Selaku Wakil Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Lis Djuniar, SE. Selaku pembimbing II yang telah memberikan dorongan dan motivasi serta bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.

6. Segenap Tim Pengajar dan Staf Administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Pimpinan beserta staf dan karyawan/karyawati Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.
8. Kepada kedua orang tuaku tercinta yang telah memberikan begitu banyak pengorbanan untukku “ **TERIMAKASIH** ”.
9. Kepada Saudara-saudariku : Ayuk Ziro, Ayuk Kar, Kak Zilly, Ayuk Asni, Kak Yus dan Adik Santo terimakasih atas dukungan dan doanya.
10. Special Someone “ Billian Syaputra ” yang telah memberikan dukungan dan dorongan serta waktu yang diberikan dalam penyusunan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabatku “ Ria, Gita, Rina, Eni, Ike’, Bia, May dan lain-lain yang tidak dapat ditulis satu persatu ” yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata Penulis ucapan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.....Amiin.....

Palembang, 23 Juli 2008

Maryunani

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .....</b>	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO .....</b>	iv
<b>HALAMAN PRAKATA .....</b>	v
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	vii
<b>HALAMAN DAFTAR TABEL .....</b>	x
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	xi
<b>ABSTRAK .....</b>	xii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

A. Penelitian Sebelumnya .....	9
B. Landasan Teori .....	10
1. Pengertian Retribusi Daerah .....	10
2. Objek dan Subjek Retribusi Daerah .....	12
3. Jenis-jenis Retribusi .....	13

4. Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah .....	14
5. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif .....	14
6. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan .....	15
7. Tarif Retribusi Persampahan/Kebersihan .....	16
8. Mekanisme Pemungutan Retribusi Persampahan .....	20
9. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Daerah Sebagai Pendapatan Asli Daerah .....	22

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis penelitian .....	24
B. Tempat Penelitian .....	24
C. Operasionalisasi Variabel .....	25
D. Data yang Digunakan.....	25
E. Teknik Pengumpulan Data .....	26
F. Analisis Data dan Teknik Analisis .....	27

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Hasil Penelitian .....	28
1. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang .....	28
2. Ruang Lingkup Kerja DIPENDA Kota Palembang .....	29
3. Organisasi dan Tata Kerja DIPENDA Kota Palembang ..	30
4. Aktivitas DIPENDA Kota Palembang .....	34
5. Pembagian Tugas DIPENDA Kota Palembang .....	35
6. Visi dan Misi DIPENDA Kota Palembang .....	42

7. Target dan Realisasi Kebersihan pada DIPENDA Kota Palembang .....	43
B. Pembahasan .....	43
1. Analisis Faktor-faktor Penyebab Rendahnya Realisasi Penerimaan Retribusi Kebersihan/persampahan pada DIPENDA Kota Palembang .....	43
a. Analisis Penentuan Target Belum Realistik .....	43
b. Analisis Efektivitas Pemberlakuan Sanksi.....	45
c. Analisis Tenaga Kerja .....	48
d. Analisis Biaya Operasional Pemungutan Retribusi .....	48
e. Analisis Jumlah Pembayar Retribusi Sampah .....	49
2. Usaha Yang Dilakukan Oleh Dinas Kebersihan Kota Palembang dalam meningkatkan Penerimaan Retribusi kebersihan di Kota Palembang.....	49
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Simpulan .....	51
B. Saran .....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	53
<b>LAMPIRAN .....</b>	54



## **DAFTAR TABEL**

Tabel I.1	Sumber Sampah dan Volume Pengangkutan	
	Tahun 2006.....	4
Tabel I.2	Perkembangan Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi	
	Kebersihan di Kota Palembang Tahun 2002-2007.....	5
Tabel I.3	Sumbangan Retribusi Pelayanan Kebersihan Terhadap	
	Retribusi Daerah Di Kota Palembang Tahun 2002-2007.....	6
Tabel III.1	Operasionalisasi Variabel.....	25
Tabel IV.1	Perkembangan Retribusi Kebersihan Dalam Enam Tahun	
	Terakhir (2002-2007).....	43
Tabel IV.2	Jawaban (Dinas Kebersihan Kota Palembang) atas	
	Pertanyaan (Wawancara).....	46

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Daftar Realisasi Penerimaan Kota Palembang Tahun 2002.....	54
Daftar Realisasi Penerimaan Kota Palembang Tahun 2003.....	58
Daftar Realisasi Penerimaan Kota Palembang Tahun 2004.....	62
Daftar Realisasi Penerimaan Kota Palembang Tahun 2005.....	66
Daftar Realisasi Penerimaan Kota Palembang Tahun 2006.....	70
Daftar Realisasi Penerimaan Kota Palembang Tahun 2007.....	74
Surat Keterangan Selesai Riset.....	82
Lembar Pengesahan Perbaikan Skripsi .....	84
Kartu Aktivitas Bimbingan Usulan Penelitian.....	85
Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi.....	86
Biodata .....	87
Setifikat Lulus Membaca Alqur'an.....	88

## ABSTRAK

Maryunani / 22 2003 177 / 2008 / Analisis Rendahnya Realisasi Penerimaan Retribusi Kebersihan/Persampahan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang / Akuntansi Pemerintahan.

Perumusan masalahnya adalah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya realisasi retribusi kebersihan/persampahan pada Dinas Pendapatan Dearah Kota Palembang dan usaha-usaha apa saja yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan Kota Palembang dalam meningkatkan penerimaan retribusi kebersihan di Kota Palembang. Tujuannya untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan tidak tercapainya target Retribusi Kebersihan/persampahan dari Tahun 2002-2007 dan untuk mengetahui usaha-usaha yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan Kota Palembang dalam meningkatkan penerimaan retribusi kebersihan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskritif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui, menilai satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel lain. Unit/tempat penelitian ini dilakukan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang yang beralamat di Jalan Merdeka No.21 Palembang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data wawancara, yaitu bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden dan data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh peneliti melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh orang lain). Analisis data dan teknik analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu dengan cara menguraikan dan menjelaskan penerimaan retribusi, serta upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh Dipenda Kota Palembang dalam meningkatkan penerimaan Retribusi Kebersihan Daerah. Penelitian ini bermanfaat bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pengelolaan retribusi daerah agar di masa mendatang realisasi penerimaan retribusi kebersihan/persampahan dapat meningkat.

Hasil analisis ini menunjukkan rendahnya realisasi penerimaan retribusi kebersihan/persampahan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, hal ini dikarenakan penentuan target yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada serta kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya pembayaran retribusi.

**Kata Kunci :** Faktor-faktor penyebab rendahnya realisasi penerimaan retribusi kebersihan/persampahan.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kota Palembang merupakan Ibukota dari Propinsi Sumatra Selatan yang memiliki letak geografis yang strategis dan banyak menarik minat para penanam modal (investor) baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri untuk menanamkan modalnya di Kota Palembang. Investor yang menanamkan modalnya tersebut merupakan salah satu potensi bagi Pemerintah Kota Palembang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dalam hal ini dapat di lihat dari pesatnya pembangunan yang dilakukan di Kota Palembang dari tahun ke tahun.

Berkembangnya kondisi perekonomian pada saat ini khususnya di daerah perkotaan sangat mempengaruhi permasalahan di bidang kebersihan. Menurunnya kualitas lingkungan perkotaan karena penanganan yang kurang baik, biaya operasi dan pemeliharaan yang tidak diimbangi dengan pemasukan yang memadai. Menurunnya kemampuan ekonomi Pemerintah karena adanya tuntutan akan kondisi lingkungan pemukiman yang bersih dan sehat merupakan suatu tantangan yang tidak dapat diabaikan. Kebutuhan pelayanan prasarana di bidang kebersihan harus tetap dapat ditingkatkan atau minimal dipertahankan untuk menghindari menurunnya derajat kesehatan masyarakat.

Pembangunan adalah serangkaian usaha yang dilakukan untuk mengubah atau memperbaiki kondisi/keadaan suatu Negara. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, kemandirian dalam hal pembiayaan yang berasal dari pendapatan dari daerah makin diperlukan apalagi dengan diberlakukannya



Otonomi Daerah. Sejak bergulirnya reformasi ternyata membawa angin segar bagi pelaksanaan daerah seutuhnya. Akibat dari reformasi Pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang yang sangat penting artinya dalam kehidupan sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya sistem Pemerintah Pusat dan Daerah serta sistem hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua Undang-undang itu adalah UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 maka Pemerintah Daerah perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu sebagai berikut :

1. Kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik;
2. Jumlah penduduk;
3. Luas daerah;
4. Pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

Otonomi Daerah diberikan kepada Daerah Kota dan Kabupaten yang didasarkan pada asas desentralisasi dalam wujud ekonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Kondisi yang demikian itu ditujukan untuk peningkatan pelayanan kesejahteraan masyarakat yang semakin yang baik, pengembangan kehidupan demokrasi serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Tujuan pemberian otonomi kepada Daerah yang berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 adalah agar yang bersangkutan dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan

pemerintahan dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri, maka Daerah harus mempunyai keuangan sendiri. Semakin besar keuangan daerah berarti semakin besar pula kemauan Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah/Pemerintahan sendiri. Sumber keuangan tersebut salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Susilo dan Halim (2002:49) untuk menganalisis masalah dalam penerimaan sumber-sumber keuangan daerah yang dapat mempengaruhi PAD yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah adalah bahwa belum optimalnya pajak dan retribusi daerah di mana penyebabnya ada tiga faktor, yaitu sebagai berikut :

1. Penentuan target belum realistik ini bisa dilihat dari :
  - a. Sistem penentuan target yang didasarkan pada data historis.
  - b. Belum dimilikinya data based atau data mengenai sumber penerimaan.
2. Masih tingginya tingkat kebocoran atau kelolosan ini dikarenakan hal sebagai berikut :
  - a. Belum efektifnya pemberlakuan sangsi.
  - b. Kurangnya sarana dan prasarana untuk operasional di lapangan.

Ciri utama yang menunjukkan bahwa suatu Daerah mampu berotonomi adalah terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya Daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada bantuan-bantuan Pemerintah Pusat harus seminimal mungkin. Oleh karena itu Pendapatan Asli Daerah harus menjadi

sumber keuangan yang besar dan didukung oleh kebijakan pembagian keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Indra Bastian : 2001).

Salah satu potensi/sumber daya yang dapat ditingkatkan lagi penerimaanya di Kota Palembang yaitu Retribusi Kebersihan/Persampahan yang kegiatannya meliputi pengambilan, pengangkutan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, sampah industri dan sampah perdagangan-perdagangan. Dalam hal ini tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman dan ruang tempat umum.

Berikut ini gambaran mengenai sumber sampah dan volume pengangkutannya dapat dilihat pada Tabel I.1 berikut ini.

**Tabel I.1  
Sumber Sampah dan Volume Pengangkutan  
Tahun 2006**

No	Jenis/sumber Sampah	Total Beban Tetap (M <sup>3</sup> /hari)	Sampah Terangkut (M <sup>3</sup> )	Tingkat Pelayanan (%)
1	Pemukiman	2.910	1.179	40,5
2	Pertokoan	83	54	65
3	Perkantoran	62	30	48
4	Industri/Bengkel	165	75	45
5	Fasilitas kesehatan	10	6	60
6	Fasilitas Umum	82	21	25
7	Pasar	533	275	89
8	Restoran, Rumah Makan, warung, took	26	17	65
9	Hotel	4	3	75
10	Penyapuan jalan/saluran	58	29	50
<b>Jumlah</b>		<b>3.933</b>	<b>1.889</b>	<b>56,25</b>

**Sumber : Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Palembang, Tahun 2008.**

Dari persentase jumlah sampah yang terangkut yaitu 56,25 dari seluruh sampah yang ada dapat dikatakan bahwa kemampuan Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Palembang belum terlalu maksimal. Hal ini disebabkan karena rotasi kendaraan pengangkutan yang kurang, kemudian terbatasnya sarana dan

prasaranan yang dimiliki Dinas Kebersihan Kota. Kurangnya tempat-tempat pembuangan sampah sementara mengakibatkan banyaknya penumpukan sampah yang bukan pada tempatnya. Seperti yang telah diuraikan pada table I.1 mengenai tingkat pelayanan pengangkutan sampah yang sudah lebih 50% sampah terangkut, akan tetapi dalam upaya untuk lebih meningkatkan penerimaan melalui Retribusi Kebersihan/persampahan serta untuk membuktikan dan mempertanggung jawabkan bahwa penghargaan Adipura memang pantas untuk diberikan kepada Kota Palembang, maka peningkatan volume pengangkutan sampah adalah penting untuk merealisasikannya.

Gambaran perkembangan target dan realisasi penerimaan Retribusi Kebersihan Kota Palembang, beserta persentase kenaikan dan penurunan pencapaian target dan ralisasi mulai dari tahun anggaran 2002 sampai tahun anggaran 2007 dapat dilihat pada Tabel I.2 berikut ini.

**Tabel I.2  
Perkembangan Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Kebersihan Di  
Kota Palembang tahun 2002-2007**

No	Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2002	1.215.000.000	1.002.931.000	82,55
2	2003	1.336.500.000	886.882.600	66,36
3	2004	1.403.325.000	1.000.008.000	71,26
4	2005	1.803.900.000	964.177.500	53,45
5	2006	2.000.000.000	1.003.827.000	50,19
6	2007	3.000.000.000	1.926.020.000	64,20

**Sumber : Dipenda, Tahun 2008.**

Berdasarkan Tabel I.2 bahwa pada tahun anggaran 2007 retribusi kebersihan terjadi penurunan paling besar dengan realisasi Rp 1.926.020.000,- sedangkan target yang ditetapkan sebesar Rp 3.000.000.000,- terjadi selisih kurang (defisit) sebesar Rp 1.073.980.000,- atau 35.80%, ini membuktikan bahwa



target yang ditetapkan tidak tercapai. Hal ini dikarenakan prasarana yang sudah mulai tua, seperti kendaraan pengangkut sampah sudah tidak layak jalan lagi sehingga terkesan target yang ditetapkan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.

Upaya meningkatkan penerimaan retribusi kebersihan juga sangat berkaitan langsung dengan jasa dan pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada masyarakat baik sebagai perorangan/pribadi ataupun dalam bentuk badan usaha. Dengan demikian peningkatan penerimaan dapat memungkinkan apabila pelayanan dan fasilitas seimbang dengan biaya-biaya yang dikeluarkan Pemerintah Daerah.

Berikut ini dapat dilihat gambaran tentang sumbangan relatif penerimaan retribusi pelayanan kebersihan dalam kaitannya dengan retibusi daerah dapat dilihat pada Tabel I.3 berikut ini.

**Tabel I.3  
Sumbangan Retribusi Pelayanan Kebersihan Terhadap  
Retribusi Daerah di Kota Palembang  
Tahun 2002 – 2007**

No	Tahun Anggaran	Retribusi Kebersihan (Rp)	Retribusi Daerah (Rp)	Persentase (%)
1	2002	1.002.931.000	23.277.971.855	4,31
2	2003	886.882.600	25.418.742.848	3,49
3	2004	1.000.008.000	28.348.128.326	3,53
4	2005	964.177.500	39.904.051.546	2,42
5	2006	1.003.827.000	40.375.914.273,50	2,49
6	2007	1.926.020.000	48.572.158.218	3,97

**Sumber: Dinas Kebersihan dan Dipenda , Tahun 2008.**

Salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting selain pajak adalah Retribusi Daerah. Retribusi merupakan salah satu bentuk nyata partisipasi masyarakat di dalam membiayai program pengelolaan kebersihan.

Berdasarkan Tabel I.3 terlihat bahwa sumbangan penerimaan retribusi kebersihan terhadap Retribusi Daerah relatif kecil dan sumbangan terhadap

Pendapatan Asli Daerah juga dapat dikatakan relatif kecil. Hal ini membuktikan bahwa semakin kecil Pendapatan Asli Daerah maka pembangunan di Kota Palembang akan terhambat atau tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Melihat pentingnya sumber keuangan daerah Kota Palembang maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **” Analisis Rendahnya Realisasi Penerimaan Retribusi Kebersihan /persampahan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya realisasi retribusi kebersihan/persampahan pada Dinas Pendapatan Dearah Kota Palembang?
2. Usaha-usaha apa saja yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan Kota Palembang dalam meningkatkan penerimaan retribusi kebersihan di Kota Palembang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan di atas , maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan tidak tercapainya target Retribusi Kebersihan/persampahan dari Tahun 2002-2007.
2. Untuk mengetahui usaha-usaha yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan Kota Palembang dalam meningkatkan penerimaan retribusi kebersihan.

## D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dari analisis permasalahan yang telah penulis rumuskan adalah sebagai berikut :

### 1. Bagi Penulis

Menambah wawasan keilmuan mengenai retribusi daerah khususnya retribusi kebersihan/persampahan serta pengetahuan dan pengalaman bagi penulis dalam bidang penelitian yang dimulai dari pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data, selain itu merupakan suatu penerapan teori-teori dan pengetahuan yang telah diterima dan dipelajari selama ini.

### 2. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pengelolaan retribusi daerah agar di masa mendatang realisasi penerimaan retribusi kebersihan/persampahan dapat meningkat.

### 3. Bagi Almamater

Sebagai bahan pertimbangan penting bagi penelitian yang serupa di masa yang akan datang.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Sebelumnya**

Penelitian sebelumnya berjudul Analisis Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Sebagai Sumber Keuangan Daerah di Kota Palembang. Telah dilakukan oleh Chairini (2007). Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat pencapaian pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Palembang dan upaya apa saja yang dilakukan dalam mengelola penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana tingkat pencapaian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Palembang, kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah serta upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mengelola penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak Pemerintah Kota Palembang, dokumentasi dilakukan dengan cara mengcopy dokumen-dokumen atau peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pajak daerah dan retribusi daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan penerimaan pajak dan retribusi daerah di Kota Palembang tidak mencapai target. Pajak daerah yang tidak tercapai targetnya antara lain disebabkan dari pajak hiburan, pajak restoran dan pajak parkir. Sedangkan untuk retribusi daerah yang tidak tercapainya target antara lain disebabkan dari retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan, retribusi parkir

di tepi jalan umum, retribusi izin trayek angkutan umum, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran dan retribusi rumah potong hewan.

## B. Landasan Teori

### 1. Pengertian Retribusi Daerah

Menurut M Suparmoko (2001:85), Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Menurut Marihot P. Siahaan (2005: 437) kriteria Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

#### a. Retribusi Jasa Umum

Kriteria retribusi jasa umum adalah sebagai berikut :

- 1) Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi perizinan tertentu.
- 2) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi.
- 3) Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- 4) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
- 5) Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan Nasional mengenai penyelenggaranya.



- 6) Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan salah satu sumber pendapatan yang potensial.
- 7) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

b. Retribusi Jasa Usaha

Kriteria retribusi jasa usaha adalah sebagai berikut :

- 1) Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu.
- 2) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seharusnya disediakan oleh sektor swasta, tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Kriteria retribusi perizinan tertentu adalah sebagai berikut :

- 1) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desantralisasi.
- 2) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
- 3) Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

## 2. Objek dan Subjek Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 65 dan 66 Tahun 2001 (2001 : 92-94)

disebutkan objek retribusi terdiri dari :

- a. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau yang diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b. Retribusi Jasa Usaha adalah jasa usaha yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Menurut Peraturan Pemerintah No 65 dan 66 Tahun 2001 (2001:92-94) disebutkan subjek retribusi adalah sebagai berikut :

- a. Subjek Retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- b. Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.

### **3. Jenis-Jenis Retribusi**

Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 66 Tahun 2001 (2001: 92)

jenis-jenis retribusi sebagai berikut :

a. Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum adalah :

- 1) Retribusi pelayanan kesehatan.
- 2) Retribusi pelayanan kebersihan /persampahan.
- 3) Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil.
- 4) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
- 5) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- 6) Retribusi pelayanan pasar.
- 7) Retribusi pengujian kendaraan bermotor.
- 8) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
- 9) Retribusi penggantian biya cetak peta, dan
- 10) Retribusi pengujian kapal perikanan.

b. Jenis-jenis Retribusi Jasa usaha adalah :

- 1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah.
- 2) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan.
- 3) Retribusi tempat pelelangan.
- 4) Retribusi terminal.
- 5) Retribusi tempat parkir.
- 6) Retribusi tempat penginapan / pesangrahan / villa.
- 7) Retribusi penyedotan kakus.
- 8) Retribusi rumah potang hewan.

- 9) Retribusi pelayanan pelabuhan kapal.
  - 10) Retribusi tempat rekreasi dan olah raga.
  - 11) Retribusi penyebrangan diatas air.
  - 12) Retribusi pengolahan limbah cair.
  - 13) Retribusi penjualan retribusi usaha daerah.
- c. Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum adalah :
- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
  - 2) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol.
  - 3) Retribusi izin gangguan.
  - 4) Retribusi Izin Trayek.

#### **4. Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah**

Menurut Erly Suandy (2000:146) Sistem Pemungutan Retribusi adalah Official Assement yaitu pemungutan retribusi daerah berdasarkan penetapan Kepala Daerah dan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan, wajib retribusi setelah menerima SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan tinggal menentukan pembayaran menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) pada Kantor Pos atau Bank Persepsi. Jika wajib retribusi tidak atau kurang membayar akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

#### **5. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif**

Pasal 21 Undang-undang No. 34 tahun 2000 disebutkan bahwa prinsip dan sasaran dalam penerapan tarif ditentukan sebagai berikut :

- a. Untuk Retribusi Jasa Umum, ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan ;
- b. Untuk retribusi jasa usaha, didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak ;
- c. Untuk retribusi perizinan tertentu, didasarkan pada tujuan untuk menutup bagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

## **6. Retribusi Pelayanan Persampahan Atau Kebersihan**

Retribusi persampahan menurut Peraturan Daerah No.12 tahun 2006 tentang pengelola dan retribusi persampahan / kebersihan.

### **a. Pengertian Pelayanan Persampahan**

Pelayanan persampahan adalah pembersihan, pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/ pemusnahan sampah rumah tangga, industri, perdagangan, dan tempat hiburan lainnya.

### **b. Pengertian Retribusi Persampahan/Kebersihan**

Selanjutnya disebut retribusi kebersihan adalah biaya yang dipungut atas pelayanan persampahan dan kebersihan yang disediakan oleh pemerintah kota.

### **c. Objek Retribusi Persampahan/Kebersihan**

Objek Retribusi Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah kota di bidang



persampahan/kebersihan untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum.

d. Subjek Retribusi Persampahan/Kebersihan

Subjek Retribusi Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati jasa pelayanan di bidang Persampahan/Kebersihan.

e. Wajib Retribusi Persampahan/Kebersihan.

Wajib Retribusi Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau pelayanan di bidang Persampahan/Kebersihan.

## **7. Tarif Retribusi Persampahan/Kebersihan**

Tarif Retribusi Persampahan/Kebersihan adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang diberikan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang. Tarif dapat ditentukan atau dapat diadakan pembedaan mengenai golongan tarif sesuai dengan prinsip dan sasaran tertentu.

Cara mengukur tingkat Retribusi Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan dan fasilitas serta biaya yang dikeluarkan Pemerintah Kota untuk menyelenggarakan retribusi persampahan dan kebersihan. Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi persampahan/kebersihan berdasarkan besarnya biaya penyediaan jasa di bidang persampahan/kebersihan.

Struktur besarnya tarif retribusi persampahan/kebersihan ditetapkan sebagai berikut :

a. Rumah Kediaman :

1) Kelas 1	Rp	10.000,-/bulan
2) Kelas 2	Rp	7.500,-/bulan
3) Kelas 3	Rp	5.000,-/bulan
4) Kelas 4	Rp	2.500,-/bulan

b. Asrama

1) Komersil	Rp.	100.000,-/bulan
2) Non Komersil	Rp.	50.000,-/bulan

c. Hotel

1) Hotel berbintang		
a) Bintang 5	Rp.	1.000.000,-/bulan
b) Bintang 4	Rp.	750.000,-/bulan
c) Bintang 3	Rp.	600.000,-/bulan
d) Bintang 2	Rp.	500.000,-/bulan
e) Bintang 1	Rp.	400.000,-/bulan

2) Hotel Melati

a) Hotel Melati 3	Rp.	150.000,-/bulan
b) Hotel Melati 2	Rp.	125.000,-/bulan
c) Hotel Melati 1	Rp.	100.000,-/bulan
d) Penginapan/Losmen/Mess/Rumah Kost	Rp.	100.000,-/bulan

d. Restoran / Bar/ Karaoke

1) Kelas 1	Rp	350.000,-/bulan
2) Kelas II	Rp	300.000,-/bulan
3) Kelas III	Rp	250.000,-/bulan

e. Rumah Makan

1) Kelas I	Rp 250.000,-/bulan
2) Kelas II	Rp 200.000,-/bulan
3) Kelas III	Rp 150.000,-/bulan

f. Rumah Sakit

1) Kelas I	Rp 300.000,-/bulan
2) Kelas II	Rp 200.000,-/bulan
3) Kelas III	Rp 150.000,-/bulan

g. Klinik Bersalin

1) Kelas I	Rp 250.000,-/bulan
2) Kelas II	Rp 200.000,-/bulan
3) Kelas III	Rp 150.000,-/bulan

h. Tempat Praktek Dokter

1) Kelas I	Rp 30.000,-/bulan
2) Kelas II	Rp 20.000,-/bulan
3) Kelas III	Rp 15.000,-/bulan

i. Apotek

1) Kelas I	Rp 150.000,-/bulan
2) Kelas II	Rp 100.000,-/bulan

j. Gerobak Jualan

1) Kelas I	Rp 25.000,-/bulan
2) Kelas II	Rp 20.000,-/bulan
3) Kelas III	Rp 15.000,-/bulan

k. Bioskop		
1) Kelas I	Rp	150.000,-/bulan
2) Kelas II	Rp	100.000,-/bulan
3) Kelas III	Rp	75.000,-/bulan
l. Gudang		
1) Kelas I	Rp	300.000,-/bulan
2) Kelas II	Rp	250.000,-/bulan
3) Kelas III	Rp	200.000,-/bulan
m. Kantor		
1) Kelas I	Rp	75.000,-/bulan
2) Kelas II	Rp	50.000,-/bulan
3) Kelas III	Rp	25.000,-/bulan
n. Toko		
1) Kelas I	Rp	75.000,-/bulan
2) Kelas I	Rp	50.000,-/bulan
3) Kelas I	Rp	25.000,-/bulan
o. Perusahaan Pertukangan/ Pengelolahan Bahan Perdagangan		
1) Kelas I	Rp	150.000,-/bulan
2) Kelas I	Rp	100.000,-/bulan
3) Kelas III	Rp	50.000,-/bulan
p. Bengkel Reparasi		
1) Kelas I	Rp	100.000,-/bulan
2) Kelas II	Rp	75.000,-/bulan
3) Kelas III	Rp	50.000,-/bulan

## q. Toko Variasi

1) Kelas I	Rp 200.000,-/bulan
2) Kelas II	Rp 150.000,-/bulan
3) Kelas III	Rp 100.000,-/bulan

## r. Pabrik/ industri

1) Kelas I	Rp 500.000,-/bulan
2) Kelas II	Rp 250.000,-/bulan
3) Kelas III	Rp 100.000,-/bulan

## s. Warung

1) Kelas I	Rp 10.000,-/bulan
2) Kelas II	Rp 7.500,-/bulan
3) Kelas III	Rp 5.000,-/bulan

t. Tempat Hiburan Lainnya Rp 50.000,-/hari

u. Tempat Sampah perorangan / Khusus Rp 75.000,-/rit

**8. Mekanisme Pemungutan Retribusi Persampahan**

Menurut Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2006 Tentang Pengelolahan Retribusi Persampahan/Kebersihan, Mekanisme Pemungutan Retribusi Persampahan adalah sebagai berikut :

## a. Pendataan dan Pendaftaran

Untuk mendapatkan data wajib Retribusi perlu dilaksanakan pendataan dan pendaftaran terhadap retribusi yang berdomisili dalam daerah. Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendataan dan pendaftaran disampaikan kepada wajib retribusi : setelah formulir

pendataan dan pendaftaran atau disampaikan kepada retribusi di isi dengan jelas, lengkap dan benar lalu dikembalikan ke petugas retribusi .

b. Penetapan Retribusi

Penetapan retribusi berdasarkan SKRD/Surat Keputusan Retribusi Daerah, jika SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah). Dalam hal ini jika SKRD tak dipenuhi untuk wajib retribusi serta penentuan tarif retrubusi ditetapkan untuk Walikota apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemui data baru atau data yang semua belum terungkap maka dikeluarkan SKRD tambahan.

c. Pemungutan Retribusi

Retribusi dipungut menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Dalam hal ini wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dan retribusi yang tentang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah).

d. Penagihan Retribusi

Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkannya segera setelah 7 (tujuh) hari sejak tempat pembayaran. Dalam jangka waktu 7 hari (tujuh) setelah tanggal surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

e. Pembayaran Retribusi

Pembayaran retribusi daerah dilaksanakan ke kas daerah selambat-lambatnya setelah dilakukan pembayaran, wajib retribusi akan mendapatkan tanda bukti pembayaran dan akan dicatat di buku penerimaan bentuk, isi, kualitas, ukuran tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Walikota.

f. Pembukuan dan Pelaporan

SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD dicatat dalam buku retribusi. Arsip dokumen yang telah dicatat akan disampaikan sesuai nomor berkas secara berurutan. Besarnya penyetoran retribusi dihimpun dalam buku retribusi atas dasar buku retribusi akan dibuat daftar penerimaan retribusi sesuai masa retribusi.

## **9. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Daerah Sebagai Pendapatan Asli Daerah**

### **a. Menurut Susilo dan Halim (2002:49)**

Dalam kajian tentang Keuangan Daerah Pemerintah Kota Malang untuk menganalisis masalah dalam penerimaan sumber-sumber keuangan daerah yang dapat mempengaruhi PAD yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah adalah bahwa belum optimalnya pajak dan retribusi daerah dimana penyebabnya ada tiga faktor, yaitu sebagai berikut :

1) Penentuan target belum realistik, ini bisa dilihat dari :

Penentuan target berdasarkan anggaran.

2) Masih tingginya tingkat kebocoran atau kelolosan, ini dikarenakan :

a) Belum efektifnya pemberlakukannya sangsi.

- b) Kenaikan tarif retribusi.
- 3) Kurangnya sarana dan prasarana operasional di lapangan karena disebabkan oleh terbatasnya sumber daya atau petugas pelaksana di lapangan serta adanya birokrasi dalam layanan pemungutan pajak dan retribusi.

**b. Menurut Mudrajad Kuncoro (2000:414)**

Setidaknya ada lima penyebab utama rendahnya Pendapatan Asli Daerah yang pada gilirannya menyebabkan ketergantungan terhadap subsidi Pemerintah Pusat, yaitu sebagai berikut :

- 1) Kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.
- 2) Tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan.
- 3) Kendati pajak daerah sangat beragam, ternyata hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan.
- 4) Penyebab keempat bersifat politis, ada yang khawatir apabila daerah mempunyai sumber keuangan yang tinggi akan mendorong terjadinya disintegrasi dan saparatisme.
- 5) Kelemahan dalam pemberian subsidi dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Menurut Sugiyono (2001:11) jenis penelitian ini dilihat dari tingkat eksplorasi ada 3 (tiga) macam yaitu :

##### **1. Penelitian Deskritif**

Merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui, menilai variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel lain.

##### **2. Penelitian Asosiatif**

Merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini mempunyai dua tingkatan yang tertinggi bila dibandingkan dengan penelitian deskritif dan komperatif. Dengan penelitian ini, maka akan dapat dibuat suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengambil suatu gejala.

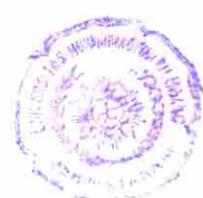
##### **3. Penelitian Komparatif**

Merupakan penelitian yang bersifat membandingkan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskritif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui, menilai satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel lain.

#### **B. Tempat Penelitian**

Unit/tempat penelitian ini dilakukan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang yang beralamat di Jalan Merdeka No.21 Palembang.



### C. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi Variabel adalah definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan bagaimana variabel tersebut diukur.

**Tabel III.1**  
**Operasionalisasi Variabel**

Variabel	Definisi	Indikator
Faktor penyebab tidak tercapainya target Penerimaan retribusi kebersihan/persampahan daerah.	Hal-hal apa saja yang menjadi bagian dalam memperoleh suatu keinginan dan tujuan yang hendak dicapai	- Penentuan target - Tenaga kerja - Biaya Operasional - Jumlah pembayar retribusi - Belum efektifnya pemberlakuan sangsi

Sumber : Pengolah Data, Tahun 2008.

### D. Data Yang Digunakan

Dilihat dari cara memperolehnya (Indriantoro dan Supomo, 2004:146) yaitu terdiri dari :

1. Data Primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara).
2. Data Sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh orang lain).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data wawancara, yaitu bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden seperti data sumber sampah dan volume pengangkutan sampah (table 1.1). dan

data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh peneliti melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh orang lain), yang terdiri dari :

1. Realisasi Penerimaan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang Tahun 2007.
2. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang Tahun 2007.
3. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang Tahun 2007.
4. Sejarah Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang Tahun 2007.
5. Aktivitas Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang Tahun 2007.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data menurut Nan Lin dalam buku W Gulo (2000:115-123) terdiri dari :

1. Pengamatan (observasi) adalah metode pengumpulan data, peneliti mencatat infomasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.
2. Survei adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan instrument untuk meminta tanggapan dan respon terhadap sample.
3. Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden.
4. Kuisioner adalah pertanyaan yang disusun dalam bentuk kalimat “Tanya”.
5. Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu lalu.

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, yaitu bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan

responden seperti data sumber sampah dan volume pengangkutan sampah (tabel I.1) dan dokumentasi, yaitu catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu lalu seperti data perkembangan target dan realisasi penerimaan retribusi kebersihan di kota Palembang (tabel I.2) serta data sumbangan retribusi pelayanan kebersihan terhadap retribusi daerah di Kota Palembang (tabel I.3).

## F. Analisis Data dan Teknik Analisis

Menurut Soeretno dan Lin Colin Arsyad ( 2003:125 ) menyatakan bahwa analisis data ada dua yaitu :

1. Metode Analisis Kuantitatif adalah analisis data dimana datanya dinyatakan dalam bentuk angka-angka yang dapat diukur.
2. Metode Analisis Kualitatif adalah analisis data di mana datanya tidak dinyatakan dalam bentuk angka-angka.

Analisis data dan teknik analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu dengan cara menguraikan dan menjelaskan penerimaan retribusi, serta upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh Dipenda Kota Palembang dalam meningkatkan penerimaan Retribusi Kebersihan Daerah.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Kota Palembang**

Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kota Palembang beralamat di Jalan Merdeka No.21 Palembang. Wilayah kerja DIPENDA kota Palembang terdiri dari beberapa Kecamatan yang ada di Palembang yaitu Kecamatan Seberang Ulu I, Kecamatan Seberang Ulu II, Kecamatan Kertapati, Kecamatan Plaju, Kecamatan Ilir Barat I, Kecamatan Ilir Barat II, Kecamatan Ilir Timur I, Kecamatan Ilir Timur II, Kecamatan Kalidoni, Kecamatan Gandus, Kecamatan Sukarami dan Kecamatan Kemuning.

Sebelum tahun 1977, urusan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II merupakan bagian dari biro keuangan Pemerintahan Daerah masing-masing. Supaya pelaksanaan urusan pajak daerah dan retribusi daerah lebih teratur, maka dikeluarkan Peraturan Daerah Tingkat II Palembang No.9 Tahun 1975 tepatnya tanggal 2 November 1975 yang merupakan landasan pembentukan DIPENDA bagi Kota Palembang dengan status kedudukan sebagai aparat pelaksana Pemerintahan Daerah yang mempunyai tugas mengelola segala hal di bidang pendapatan, penetapan, penagihan berbagai pendapatan yang menjadi hak dan wewenang Pemerintah Kota Palembang sesuai peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1980 dibentuklah DIPENDA Kota Palembang yang struktur organisasi dan tata kerjanya



berlaku di seluruh Indonesia. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1980 tersebut disempurnakan kembali dengan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 1990.

Seiring dengan berlakunya Otonomi Daerah, pendapatan daerah pun mengalami berbagai perubahan baik dari segi tugas, fungsi serta struktur dan kedudukannya, maka pada tanggal 7 Maret 2001 dikeluarkannya Peraturan Daerah Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi DIPENDA yang mengacu atau sejalan dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

## **2. Ruang Lingkup Kerja DIPENDA Kota Palembang**

Berdasarkan Keputusan Walikota Palembang Nomor 2 Tahun 2001, ruang lingkup dari DIPENDA Kota Palembang adalah unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah di bidang pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya. Ruang lingkup tidak berlaku untuk sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan karena bukan menjadi tanggung jawab dan wewenang DIPENDA. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2001 secara umum ruang lingkup kerja Dipenda Daerah sebagai berikut :

- a. Melakukan perumusan kebijakan teknik, pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknik dan tugas-tugas lainnya yang diserahkan oleh kepala daerah kepadanya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

- b. Melakukan pendaftaran dan pendataan wajib pajak.
- c. Melakukan penetapan besarnya pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.
- d. Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.
- e. Melakukan penyuluhan mengenai daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.
- f. Melakukan urusan tata usaha.

### **3. Organisasi dan Tata Kerja DIPENDA Kota Palembang**

Struktur organisasi DIPENDA Kota Palembang dipimpin oleh seorang kepala dinas dan dibantu seorang wakil kepala dinas. Kepala dinas membawahi lima sub dinas dan kelima sub dinas di sini adalah merupakan bukan cabang dinas dan sub bagian, melainkan unit bagian yang ada di DIPENDA Kota Palembang. Sub dinas di sini yaitu seksi-seksi yang membawahi Bidang Tata Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional, Cabang Dinas serta Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD). Berikut ini akan diuraikan mengenai susunan organisasi DIPENDA Kota Palembang yaitu sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Wakil Kepala Dinas
- c. Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bagian Tata Usaha
  - 1) Sub Bagian Umum

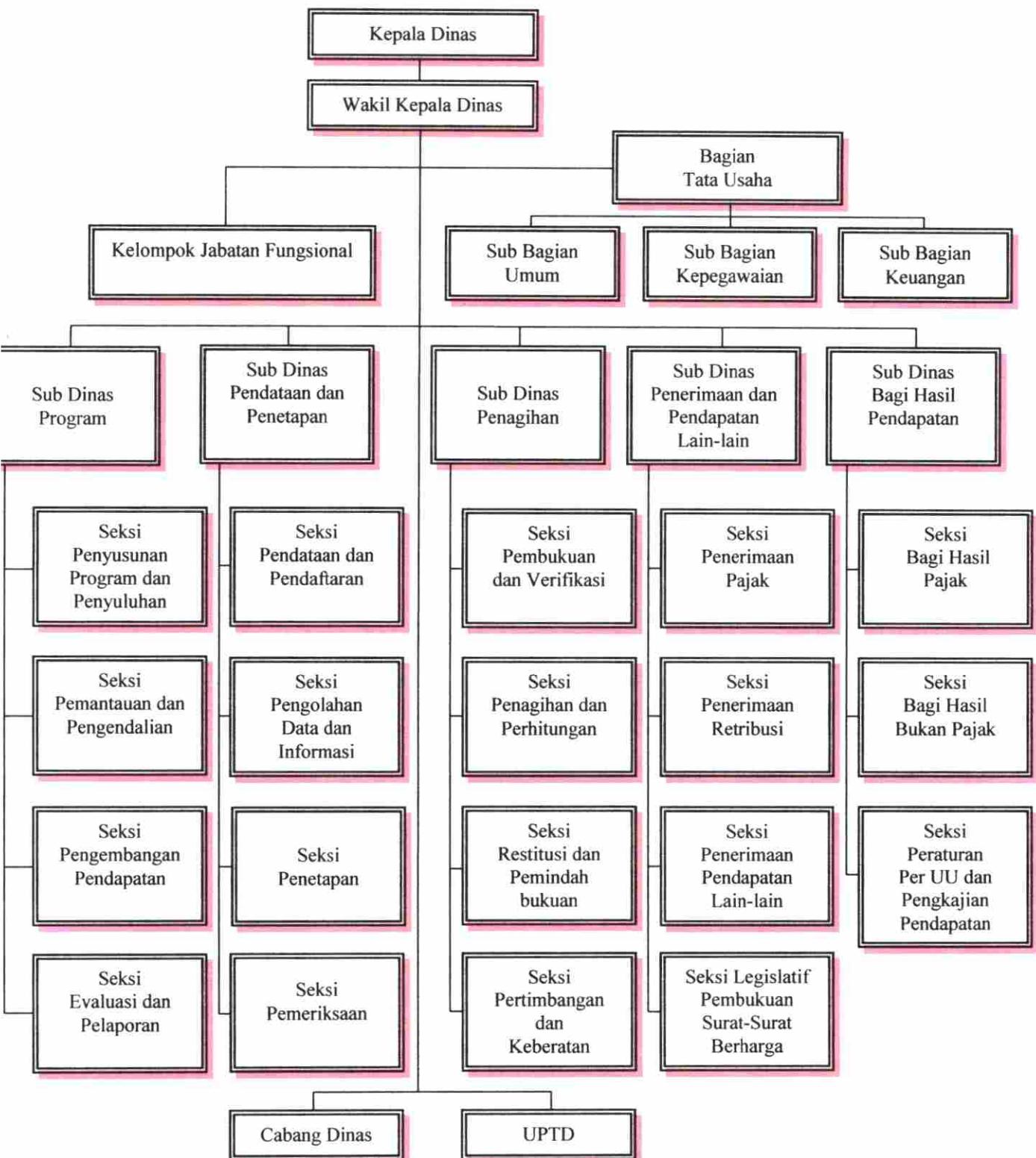
- 2) Sub Bagian Kepegawaian
- 3) Sub Bagian Keuangan
- e. Sub Dinas Program
  - 1) Seksi Penyusunan Program dan Penyuluhan
  - 2) Seksi Pemantauan dan Pengendalian
  - 3) Seksi Pengembangan Pendapatan
  - 4) Seksi Evaluasi dan Pelaporan
- f. Sub Dinas Pendataan dan Penetapan
  - 1) Seksi Pendataan dan Pendaftaran
  - 2) Seksi Pengolahan Data dan Informasi
  - 3) Seksi Penetapan
  - 4) Seksi Pemeriksaan
- g. Sub Dinas Penagihan
  - 1) Seksi Pembukuan dan Verifikasi
  - 2) Seksi Penagihan dan Perhitungan
  - 3) Seksi Retribusi dan Pemindah bukuhan
  - 4) Seksi Pertimbangan dan Keberatan
- h. Sub Dinas Penerimaan dan Pendapatan Lain-lain
  - 1) Seksi Penerimaan Pajak
  - 2) Seksi Penerimaan Retribusi
  - 3) Seksi Penerimaan Pendapatan Lain-lain
  - 4) Seksi Legalisasi dan Pembukuan Surat-surat Berharga
- i. Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan
  - 1) Seksi Bagi Hasil Pajak



- 2) Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak
- 3) Seksi Peraturan Perundangan-Undangan dan Pengkajian Pendapatan
  - j. Cabang Dinas
  - k. Unit Pelaksana Teknik Dinas
  - l. Kelompok Jabatan Fungsional



**Gambar IV. 1**  
**Struktur Organisasi**  
**Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang**



Sumber Data : Dinas Pendapatan Daerah, 2008

#### **4. Aktivitas DIPENDA Kota Palembang**

Berdasarkan peraturan daerah No.2 Tahun 2001 tentang Tugas Dinas Pendapatan Daerah, dijelaskan bahwa tugas pokok dari DIPENDA Kota Palembang adalah sebagai unsur pelaksana Pemerintahan Daerah di bidang pemungutan pendapatan daerah dan mengadakan koordinasi dengan instansi lain dalam perencanaan, penetapan, pelaksanaan, dan pengendalian pungutan pendapatan daerah khususnya pada Kota Palembang. Fungsi DIPENDA Kota Palembang yaitu :

- a. Melakukan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan koordinasi teknis di bidang pungutan pendapatan daerah yang berlaku.
- b. Melakukan pungutan pendapatan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Koordinasi teknik pungutan seluruh usaha di bidang pungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta pungutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Perencanaan, pelaksanaan, pengkajian, pengawasan dan pengendalian evaluasi dan pengembangan pungutan pendapatan daerah.
- e. Melaksanakan teknik administrasi.
- f. Melakukan penyuluhan mengenai pajak daerah, retribusi dan pendapatan asal daerah lainnya.
- g. Melakukan urusan tata usaha.
- h. Melakukan penetapan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah.
- i. Melakukan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah.

DIPENDA Kota Palembang adalah termasuk dalam bentuk organisasi secara garis besar dan fungsional, karena bagian-bagian sub-sub dinas mempunyai tugas masing-masing dan melaksanakan wewenang dan tanggung jawab yang besar kepada atasannya. Pembagian tugas dalam instansi ini sangat penting karena dapat memusatkan perhatian pada pekerjaan sesuai dengan kemampuan.

## **5. Pembagian Tugas DIPENDA Kota Palembang**

Uraian tugas dan fungsi masing-masing unit yang ada di DIPENDA Kota Palembang adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas Pendapatan Daerah

1) Kepala Dinas sebagai pemimpin di DIPENDA memiliki tugas :

Merencanakan dan merumuskan peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah, memonitoring dan menguji kebenaran realisasi kebenaran pendapatan daerah.

2) Kepala Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

a) Melaksanakan penyusunan anggaran, perubahan dan perhitungan APBD.

b) Melaksanakan administrasi pemungutan Pendapatan Daerah.

b. Wakil Kepala Dinas

1) Wakil Kepala Dinas memiliki tugas sebagai berikut :

Membantu kepala dinas dalam merencanakan merumuskan melakukan pengawasan pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah.

2) Wakil Kepala Dinas memiliki fungsi sebagai berikut :

a) Melaksanakan tugas kepala dinas apabila yang bersangkutan berhalangan.

b) Melaksanakan perencanaan pendapatan.

c) Melaksanakan pengawasan, pelaksanaan pendapatan daerah.

d) Melaksanakan verifikasi penerimaan daerah.

c. Bagian Tata Usaha

1) Bagian Tata Usaha memiliki tugas :

Melaksanakan urusan keuangan kepegawaian, urusan perlengkapan dan urusan umum.

2) Bagian Tata Usaha memiliki fungsi :

a) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.

b) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.

c) Melaksanakan pengurusan rumah tangga.

d) Melaksanakan pengelolaan umum meliputi surat-menurut, kearsipan dan pengendalian.

Bagian-bagian tata usaha :

a) Sub Bagian Umum

Mempunyai tugas surat menyurat, kearsipan dan rumah tangga.

b) Sub Bagian Kepegawaian

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan, pengembangan dan mutasi pegawai serta mengurus pengelolaan administrasi kepegawaian.

c) Sub Bagian Keuangan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan anggaran belanja dinas, mengurus pembukuan dan kas serta membuat laporan keuangan.

d. Sub Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Sub DIPENDA merupakan unit bagian yang terdapat pada DIPENDA Kota Palembang yang memiliki sub bagian dengan seksi-seksi sub dinas, yaitu terdiri dari Sub Dinas Program, Sub Dinas Pendataan dan Penetapan, Sub Dinas Penagihan, Sub Dinas Penerimaan dan Pendapatan lain-lain dan Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan dengan uraian tugas yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2001.

e. Sub Dinas Pogram

Sub Dinas Program mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan program di bidang pendapatan dan melaksanakan pemungutan dan pengendalian, pengembangan pendapatan serta mengadakan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Dinas Pendapatan Daerah dalam meningkatkan PAD.

Sub Dinas Program terdiri dari :

1) Seksi Penyusunan Program dan Penyuluhan.

Mempunyai tugas menyusun rencana penerimaan dan program kegiatan rutin dan pembangunan.

2) Seksi Pemantauan dan Pengendalian.

Mempunyai tugas melakukan penelitian, pengkajian dan pengembangan terhadap tahap pendapatan daerah dan potensi pendapatan daerah.

3) Seksi Pengembangan Pendapatan.

Mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan pengendalian yang berhubungan dengan penerimaan pendapatan daerah.

4) Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Mempunyai tugas melakukan evaluasi mengenai pemungutan pajak daerah retribusi daerah dan penerimaan daerah lainnya.

f. Sub Dinas Pendataan dan Penetapan

Mempunyai tugas melaksanakan pendataan dan pendaftaran, mengelola data dan informasi, penetapan dan pemeriksaan.

Sub Dinas Pendataan dan Penetapan terdiri dari :

1) Seksi Pendataan dan Pendaftaran

Mempunyai tugas melaksanakan pendataan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah, menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maupun Nomor Pokok wajib Pajak Retribusi (NPWR) serta melakukan pendaftaran, pemeriksaan, pengawasan objek dan subjek pajak.

2) Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Mempunyai tugas mengolah data-data yang diperlukan dan sebagai tempat semua informasi yang dibutuhkan.

### 3) Seksi Penetapan

Mempunyai tugas melakukan usulan penetapan pajak, penerbitan surat ketetapan pajak dan menyiapkan daftar penetapan pajak.

### 4) Seksi Pemeriksaan

Mempunyai tugas melakukan pemeriksaan, penyelidikan serta penetapan dan pengawasan subjek dan objek, retribusi daerah serta pemeriksaan lokasi atau lapangan.

#### g. Sub Dinas Penagihan

Mempunyai tugas melaksanakan pembukuan verifikasi, penagihan, dan perhitungan retribusi dan pemindahan buku, pertimbangan dan keberatan.

Sub Dinas penagihan terdiri dari :

##### 1) Seksi pembukuan dari verifikasi

Mempunyai tugas melakukan pencatatan surat ketetapan pajak, pembukuan piutang, pendapatan daerah dan penerimaan pendapatan daerah serta penetapan tambahan pajak daerah dan restribusi daerah.

##### 2) Seksi Penagihan dan Perhitungan

Mempunyai tugas melakukan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah, serta pendapat asli daerah lainnya sesuai dengan ketentuan berlaku.

##### 3) Seksi Retribusi dan Pemindahan buku

Mempunyai tugas melaksanakan akan penyelesaian retribusi dan pemindahan buku serta rekonsiliasi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

#### 4) Seksi Pertimbangan dan Keberatan

Mempunyai tugas melaksanakan penetapan peraturan perundang-undangan, memberikan saran dan pertimbangan untuk penyelesaian, pengaduan, serta pelayanan keberatan terhadap penetapan pajak daerah dan retribusi daerah.

#### h. Sub Dinas Penerimaan dan Pendapatan Lain-lain

Mempunyai tugas pokok antara lain penata-usahaan, penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, penerimaan pendapatan lainnya, penerimaan BUMN serta legalisasi pembukuan surat-surat berharga.

Sub Dinas Penerimaan dan Pendapatan Lain-lain terdiri dari :

##### 1) Seksi Penerimaan Pajak

Mempunyai tugas melaksanakan penata-usahaan penerimaan pajak daerah.

##### 2) Seksi Penerimaan Retribusi

Mempunyai tugas melaksanakan penata-usahaan penerimaan retribusi daerah.

##### 3) Seksi Penerimaan Pendapatan Lain-lain

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolahan penerimaan sumber di luar pajak daerah dan retribusi daerah.

##### 4) Seksi Legislatif Pembukuan Surat-Surat Berharga

Mempunyai tugas melaksanakan pemberian pengesahan atas surat-surat ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah serta menerima dan mencatat pengadaan dan pendistribusian surat-surat berharga kepada unit kerja yang bersangkutan.



i. Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan

Mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan bagi hasil pendapatan pajak dan non pajak, bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta melakukan pengkajian pendapatan.

Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan terdiri dari :

1) Seksi Bagi Hasil Pajak

Mempunyai tugas melaksanakan administrasi dan perhitungan bagi hasil pajak.

2) Seksi bagi Hasil Bukan Pajak

Mempunyai tugas melaksanakan administrasi dan perhitungan bagi hasil bukan pajak.

3) Seksi Peraturan Perundang-Undangan dan Pengkajian Pendapatan

Mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan menyusun peraturan perundangan-undangan di bidang pendapatan daerah serta pengkajian peningkatan pendapatan.

j. Cabang Dinas

Merupakan unsur pelaksana teknis operasional dinas yang dipimpin oleh kepala cabang dinas dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada kepala dinas. Susunan organisasi cabang dinas terdiri dari kepala cabang dinas, unsur staf / petugas administrasi, unsur unit / petugas teknis, operasional serta kelompok jabatan fungsional.

k. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas ( UPTD )

UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional dinas yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada kepala dinas, serta melaksanakan sebagian tugas pada satu atau di beberapa Wilayah Kecamatan dalam satu daerah.

1. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional adalah ruang lingkup DIPENDA Kota Palembang yang mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis serta bidang keahlian masing-masing. Kelompok ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas dan kepada UPTD yang bersangkutan.

**6. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang :**

a. Visi

Visi DIPENDA adalah “Terwujudnya Pendapatan Daerah yang optimal dan mampu membiayai penyelenggaraan Otonomi Daerah”.

b. Misi

Misi DIPENDA adalah sebagai berikut :

- 1) Menggali dan mengembangkan potensi Pendapatan Daerah.
- 2) Meningkatkan penerimaan dari potensi Pendapatan Asli Daerah dan Penerimaan Daerah lainnya.
- 3) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang bersih dan bertanggung jawab.

4) Melalui pelayanan prima dapat menumbuh kembangkan kepercayaan dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak daerah dan retribusi daerah.

## **7. Target dan Realisasi Retribusi Kebersihan pada Dipenda Kota Palembang.**

**Tabel IV.1  
Perkembangan Retribusi Kebersihan  
Dalam Enam Tahun Terakhir (2002-2007) Dapat Dilihat  
Pada Tabel Dibawah Ini  
(Dalam Ribuan)**

No	Tahun Anggaran	Retribusi Kebersihan (Rp)	Retribusi Daerah (Rp)	Persentase (%)
1	2002	1.002.931.000	23.277.971.855	4,31
2	2003	886.882.600	25.418.742.848	3,49
3	2004	1.000.008.000	28.348.128.326	3,53
4	2005	964.177.500	39.904.051.546	2,42
5	2006	1.003.827.000	40.375.914.273,50	2,49
6	2007	1.926.020.000	48.572.158.218	3,97

Sumber : Dipenda Kota Palembang, Tahun 2008.

## **B. Pembahasan**

### **1. Analisis faktor-faktor penyebab rendahnya realisasi penerimaan retribusi kebersihan/persampahan pada Dipenda Kota Palembang.**

#### **a. Analisis Penentuan Target Belum Realistik**

Cara Penyusunan realisasi historis bersifat *incrementalism*, yang hanya menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item target yang sudah ada sebelumnya, dengan alasan untuk menyesuaikan besarnya target ditetapkan. Pendekatan semacam ini tidak saja menjamin terpenuhinya kebutuhan namun juga dapat mengakibatkan kesalahan yang berlanjut. Hal ini disebabkan karena belum diketahuinya pengeluaran periode sebelumnya yang dijadikan dasar penyusunan target

tahun ini telah berdasarkan atas kebutuhan yang wajar. Masalah utama anggaran yang terkait dengan tidak adanya perhatian terhadap konsep *Value For Money*, konsep ini sering kali tidak dijadikan pertimbangan dalam penyusunan anggaran tradisional yang tidak memperhatikan banyaknya jumlah sumber daya yang dimiliki. Kelemahan dari konsep ini pada akhir tahun terjadi kelebihan anggaran yang pengalokasianya kemudian dipaksakan kepada aktivitas yang sebenarnya kurang penting/tepat untuk dilaksanakan.

Penentuan target retribusi pada dasarnya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai jenis-jenis retribusi yang berhubungan dengan kepentingan nasional, di samping itu tetap memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat untuk menentukan besarnya target retribusi dilihat dari sumber daya yang dimiliki. Kemudian potensi yang ada diajukan ke Walikota melalui tim serta dibahas dan ditetapkan target. Setelah selesai, kemudian diajukan ke DPRD dan di DPRD dibahas dengan instansi terkait yang kemudian diputuskan berapa target yang harus ditentukan.

Penentuan target yang digunakan dalam menetapkan retribusi kebersihan yaitu dengan pendekatan realisasi data historis tradisional, dengan hanya menambah atau mengurangi item-item target retribusi yang sudah ada sebelumnya, sebagai dasar untuk menyesuaikan besarnya penambahan atau pengurangannya. Penggunaan pendekatan realisasi data historis tidak memungkinkan untuk dilakukan penilaian kinerja secara akurat, karena satu-satunya tolak ukur yang digunakan semata-mata pada



ketaatan dalam menggunakan dana yang diusulkan. Sentralisasi penyiapan anggaran ditambah informasi yang tidak memadai akan menyebabkan lemahnya perencanaan anggaran.

b. Analisis Efektivitas Pemberlakuan Sanksi

Penerimaan Retribusi Daerah pada kegiatan intensifikasi masih dituntut untuk dilakukan penegasan hukum atas kelalaian yang dilakukan wajib retribusi.

Berdasarkan PERDA No. 9, menyatakan bahwa :

- 1) Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 4 mengenai Perizinan dan pasal 7 tentang Tarif Retribusi, maka akan diancam pidana kurungan 6 bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- 2) Tindak pidana yang dimaksud ayat 1 pasal ini adalah Pelanggaran.

Pemberlakuan sanksi yang mengatur tentang retribusi kebersihan perlu diperhatikan, sebab ini berfungsi untuk memberikan dasar hukum yang mengikat masyarakat dalam kepatuhannya. Maka diperlukannya tingkat ketegasan hukum yang diwujudkan dengan pemberlakuan sanksi yang tegas oleh petugas. Apabila pemberlakuan sanksi tersebut berjalan dengan baik maka masyarakat lebih termotivasi untuk taat melakukan pemenuhan kewajibannya dalam pembayaran retribusi kebersihan.

Salah satunya adalah seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Retribusi Kebersihan Pasal 24. Disana jelas dikatakan jika wajib retribusi tidak

membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar maka dikenakan denda sebesar 2%. Setiap bulannya dari retribusi kebersihan yang terhutang sanksi ini diberlakukan secara optimal kepada wajib retribusi yang tidak tepat dalam pembayaran atau wajib retribusi yang kurang bayar.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada Dinas Kebersihan bahwa pemberlakuan sanksi yang telah dilaksanakan belum berjalan dengan baik/efektif, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya wajib retribusi yang belum membayar kewajibannya dengan tepat waktu seperti yang terdapat pada tabel IV.2 hasil dari wawancara berikut ini :

**Tabel IV.2  
Jawaban (Dinas Kebersihan Kota Palembang) Atas Pertanyaan  
(Wawancara)**

Pertanyaan	Jawaban Responden				
	Jumlah Wajib Retribusi 1000 orang				
	Ya	Tidak	% Ya		Tidak
1. Jumlah Wajib Retribusi yang membayar dengan tepat waktu sebelum diberlakukannya PERDA.	350	650	35		65
2. Jumlah Wajib Retribusi yang membayar dengan tepat waktu setelah diberlakukannya PERDA.	700	300	70		30

Sumber : Dinas kebersihan/persampahan Kota Palembang, 2008

Berdasarkan tabel IV.2 diatas, mengenai tingkat kepatuhan wajib retribusi yang membayar tepat waktu sebelum dan sesudah diberlakukannya Peraturan Daerah. Dari data tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib retribusi sudah berjalan dengan baik, setelah diberlakukannya Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pemberlakuan sanksi terhadap wajib retribusi yang tidak patuh.

Setelah diterbitkannya Peraturan Daerah yang memuat tentang pemberlakuan sanksi, maka hasilnya tingkat kepatuhan masyarakat sudah cukup baik.

Menurut peneliti, untuk dapat secara optimal mengenakan sanksi kepada wajib retribusi, Pemerintah Kota Palembang harus meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat baik secara langsung dan tidak langsung melalui radio, televisi ataupun lembaran yang menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dan retribusi daerah karena dana tersebut akan digunakan oleh Pemerintah Kota Palembang dalam menjalankan perekonomian dan pembangunan baik pada masa sekarang dan yang akan datang.

Kenaikan Tarif tentang Subjek dan Objek Retribusi Kebersihan berdasarkan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2006 sangat signifikan, jika dilihat pada struktur dan besarnya tarif retribusi kebersihan yang ada dalam Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2006 tentang pengelolaan retribusi kebersihan terdapat 29 item yang menjadi wajib retribusi. Salah satu item yang sangat jarang terjaring adalah rumah kediaman. Pada umumnya masyarakat sudah mengetahui Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2006 tetapi pemungutannya diserahkan ke pihak kelurahan dari kelurahan diserahkan ke RT dan RT yang menagih retribusi kebersihan ke masyarakat. Kendala masyarakat belum membayar retribusi karena mereka masih mempunyai persepsi bahwa jasa gerobak yang sudah mereka bayar merupakan retribusi, sementara jasa gerobak yang menarik sampah dan membuang sampah ke TPS murni jasa yang diperoleh oleh

pemilik/penarik gerobak. Kenaikan tarif memang sudah wajar karena Peraturan Daerah yang lama tidak layak lagi. Dimana tarif yang lama Rp 10.000 dinaikkan menjadi Rp 15.000 mengingat kenaikan BBM.

Seharusnya untuk meningkatkan tarif retribusi kebersihan rumah kediaman, Dinas Kebersihan bekerja sama dengan pihak PDAM dan pembayaran retribusi kebersihan dimasukkan ke dalam rekening PDAM.

#### c. Analisis Tenaga Kerja

Merupakan jumlah total seluruh tenaga kerja yang bekerja sebagai pemungut retribusi baik dari Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota maupun dari swadaya masyarakat.

Pelayanan persampahan merupakan salah satu usaha yang harus didepankan karena pelayanan persampahan menjadi sangat penting sehingga diperlukannya pelayanan dalam pemungutan sampah oleh Pemerintah Kota Palembang. Langkah awal untuk mencapai hasil tersebut adalah dengan mengikutsertakan para pegawai atau petugas pemungut retribusi dalam pelatihan dan diberikan pengarahan setiap seminggu sekali di samping mengevaluasi penerimaan minggu lalu. Tenaga kerja yang terlatih cukup baik akan menghasilkan kerja yang baik, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat akan dirasakan lebih baik oleh masyarakat itu sendiri.

#### d. Analisis Biaya Operasional Pemungutan Retribusi

Merupakan jumlah seluruh biaya operasional yang digunakan untuk melayani proses pemungutan retribusi sampah. Biaya-biaya tersebut meliputi : peralatan kebersihan, sapu lidi, jaring sampah,

keranjang, cangkul, mata pisau rumput, sekop plastik, sekop besi, karung plastik, mesin rumput dan lain-lain.

Peningkatan biaya operasional memberikan indikasi semakin meningkatnya tingkat pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Palembang, sehingga semakin menarik minat masyarakat untuk menjadi pembayar retribusi, karena masyarakat merasa cukup terlayani dengan baik dan memuaskan kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana persampahan di Kota Palembang.

e. Analisis Jumlah Pembayar Retribusi Sampah

Merupakan jumlah seluruh pelanggan Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota yang membayar retribusi persampahan, baik usaha maupun perorangan.

**2. Usaha-usaha yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan Kota Palembang dalam meningkatkan penerimaan retribusi kebersihan di Kota Palembang.**

a. Peningkatan Pelayanan Kebersihan

Peningkatan pelayanan kebersihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas terangkutnya sampah dari TPS ke TPA, kemudian meningkatkan kerjasama antara petugas kebersihan dengan masyarakat.

b. Peningkatan Kualitas Kinerja Pegawai

Peningkatan Kualitas Kinerja pegawai dilakukan dengan cara mendisiplinkan para pegawai dalam bekerja yang bertujuan untuk

meningkatkan Produktivitas kerja, aktivitas kehadiran kerja, dan hasil kerja yang tepat waktu.

c. Peningkatan Penerimaan Retribusi Kebersihan

Peningkatan Penerimaan Retribusi Kebersihan dilakukan dengan cara melakukan penagihan Retribusi kebersihan/persampahan pada masyarakat dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak lain seperti dengan PLN, PDAM, RT/RW, maupun secara langsung. Ini bertujuan agar pembayar retribusi dapat membayar retribusinya, sehingga penerimaan Retribusi kebersihan dapat meningkat.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

**Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan :**

1. Penentuan target yang ditetapkan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.
2. Pemberlakukan sanksi yang telah dilaksanakan belum berjalan dengan baik/efektif, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya wajib retribusi yang belum membayar kewajibannya dengan tepat waktu.
3. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Kebersihan dari hasil wawancara yang dilakukan pada Dinas Kebersihan menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Kebersihan tersebut tidak bertambah (tetap) setiap tahunnya, bahkan cenderung berkurang tetapi pengurangannya sedikit.
4. Tingkat Pelayanan kebersihan sudah cukup baik.
5. Usaha-usaha yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan Kota Palembang dalam mengangkut sampah dari TPS ke TPA belum maksimal, ini terlihat dari banyaknya sampah yang dibuang bukan pada tempatnya seperti di sungai, pada lahan kosong milik warga dan lain-lain. Peningkatan Penerimaan Retribusi Kebersihan belum maksimal, hal ini terlihat dari sumbangan retribusi kebersihan/persampahan terhadap Retribusi Daerah relatif kecil.

**B. SARAN**

1. Dalam melaksanakan pemungutan retribusi kebersihan hendaknya sesuai dengan peraturan yang ada, untuk meningkatkan penerimaan retribusi dengan melakukan perbaikan terhadap fasilitas pelayanan retribusi.
2. Supaya seluruh proses pelaksanaan kegiatan seperti pemungutan retribusi berjalan dengan baik hendaknya dilakukan pengawasan, untuk dapat melihat kekurangan-kekurangan yang terjadi, sehingga hal tersebut dapat dikurangi.
3. Hendaknya Instansi Pemerintah dalam meningkatkan target tidak hanya berdasarkan target dan realisasi dari tahun sebelumnya.
4. Hendaknya Instansi yang terkait lebih giat dalam melakukan sosialisasi terhadap masyarakat hal ini akan menumbuhkan kesadaran pada diri masyarakat perlunya membayar retribusi kebersihan untuk meningkatkan pelayanan kebersihan sehingga masalah kebersihan dari persampahan dapat teratasi.
5. Lebih tegas dalam menerapkan sanksi bagi masyarakat yang tidak mau membayar retribusi.
6. Peningkatan biaya operasional perlu dilakukan, dengan penambahan sarana dan prasana pelayanan pengangkutan sampah , kemudian dapat juga dilakukan dengan menaikkan honor dan insentif petugas penagih yang dalam hal ini merupakan kenaikan biaya operasional.

Selain meningkatkan Retribusi Kebersihan/persampahan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, Cara menangani atau merealisasikan sampah itu pun sangat penting seperti melakukan pemisahan jenis-jenis sampah (sampah organik dan non organik).

## DAFTAR PUSTAKA

- Eugenia Liliawati Mulyono, 2001. **Peraturan Perundang-undangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.** Harvarindo, Jakarta.
- Indra Bastian, 2001. **Akuntansi Sektor Di Indonesia.** Salemba Empat, Jakarta.
- M. Suparmoko, 2001. **Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah Edisi Pertama.** Andi Yogyakarta, Yogyakarta.
- Nan Lin Ali Bahasa W Gulo, 2000. **Metodelogi Penelitian.** PT. Grasindo, Jakarta.
- Nur Indrian dan Bambang Supomo, 1999. **Metodelogi Penelitian.** Erlangga, Jakarta.
- Sugiyono, 2002. **Metode Penelitian Bisnis.** Alfabetika, Jakarta.
- Sugiyono, 2004. **Metode Penelitian Bisnis.** Alfabetika, Jakarta.
- Soeratno Lin Colin Arsyad, 2003. **Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis.** UPP AMPYKPN, Yogyakarta.
- The Liang Gie, **Efisiensi Kerja Bagi Pembangunan Negara.** UGM Press, 1981.
- .....Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Hubungan Daerah dan Retribusi Daerah.
- .....Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.


  
 Amrip

**LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAERAH KOTA PALEMBANG**  
**TAHUN 2002**  
**UNTUK BULAN JANUARI S D DESEMBER 2002**

RATONED

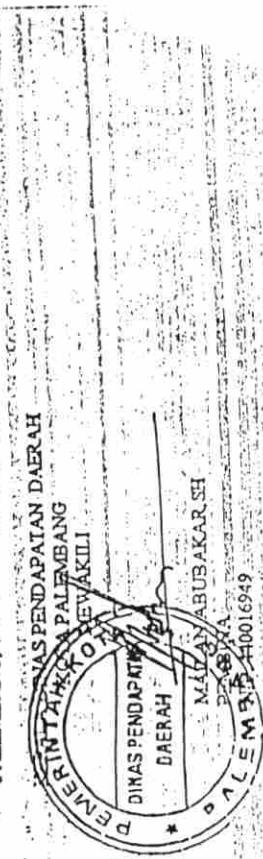
NO.	AYAT	JENIS PENERIMAAN	TARGET	SD BULAN LALU	BULANINI	REALISASI - PENDEMAN			KETERANGAN
						%	SD BULANINI	%	
1.1.1	1.2.1.004	A. PAJAK DAERAH	2.200.000.000	2.105.719.588	185.894.897	8.45	2.291.514.485	104.16	
1.1.1	1.2.1.005	PAJAK HOTEL	870.000.000	944.731.746	39.170.231	4.50	983.902.027	113.09	
1.1.1	1.2.1.006	PAJAK PERJALAN	345.000.000	936.478.557	25.977.769	2.75	962.456.536	101.85	
1.1.1	1.2.1.007	PAJAK PERERANGAN JALAN	11.133.416.900	12.232.738.723.50	1.312.350.152.50	11.79	13.545.068.576	121.66	
1.1.1	1.2.1.008	PAJAK PENGOLAHAN BAHAN GALLAN GOL C	189.873.869	185.762.011	15.100.115	7.95	200.862.826	105.79	
1.1.1	1.2.1.009	PAJAK PESTORAN	3.883.105.800	4.016.268.819	260.431.525	6.71	4.276.790.445	110.14	
1.1.1	1.2.1.010	PAJAK PARKIR	248.930.000	294.171.817	57.995.538	23.31	342.167.555	137.51	
		JUMLAH PENERIMAAN : A	19.470.228.500	20.705.871.241.50	1.896.901.478.50	9.74	22.602.772.720	116.09	
1.1.2	1.2.2.001	B. RETRIBUSI DAERAH	1.439.102.060	1.209.880.336	81.593.380	5.79	1.291.475.216	91.65	
1.1.2	1.2.2.002	RETRIBUSI PELAYANAN KESERATAN	1.215.000.000	875.768.000	127.163.300	10.47	1.002.931.000	82.55	
1.1.2	1.2.2.003	RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMANHAN KEBERSIHAN	725.000.000	772.524.050	34.291.350	4.73	806.316.000	111.23	
1.1.2	1.2.2.004	a. RETI. AKTE CATATAN BIAYA CETAK KTP	325.000.000	301.735.500	15.469.000	14.76	317.201.500	97.60	
1.1.2	1.2.2.005	b. RETI. AKTE CATATAN BIAYA CETAK KTP	27.000.000	23.224.600	1.677.250	6.19	24.895.350	92.21	
1.1.2	1.2.2.006	RETRIBUSI PEMERINTAH KAMANDAN PENGABUAN MATAAT	2.000.000.000	1.681.726.100	150.534.500	7.53	1.532.250.600	91.61	
1.1.2	1.2.2.007	RETRIBUSI PAKIR DIPEL. JALAN UMUM	2.453.729.000	2.208.427.581	246.407.37	10.04	2.454.875.368	100.05	
1.1.2	1.2.2.008	RETRIBUSI PENGELUARAN KENDARAAN BERMOTOR	1.725.000.000	1.790.708.520	153.312.750	8.89	1.944.001.590	112.70	
1.1.2	1.2.2.009	RET. PELAYANAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN	100.000.000	84.572.043	5.965.307	5.96	90.527.952	90.53	
1.1.2	1.2.2.010	RET. PELAYANAN CETAK KTP	85.000.000	72.645.000	3.025.300	3.54	75.650.000	89.00	
1.1.2	1.2.2.011	RET. PELAYANAN CETAK PETA	70.000.000	63.520.700	47.250	0.68	63.520.700	28.56	
1.1.2	1.2.2.012	RET. PELAYANAN KEAYAAN DAERAH :	-	800.000	-	-	800.000	-	
1.1.2	1.2.2.013	1. RET. PELAYANAN DAN BINAAN	70.000.000	67.720.700	47.250	0.68	63.194.900	97.42	
1.1.2	1.2.2.014	2. SEWA ALAT-ALAT BESAR	75.000.000	79.791.403.20	2.275.560	3.03	73.066.763.20	97.42	
1.1.2	1.2.2.015	3. RETRIBUSI PADA GROSIR DAN PERTOKOAN	1.156.580.000	948.363.575	109.912.375	9.50	1.038.276.450	94.95	
1.1.2	1.2.2.016	4. RETRIBUSI TERMINAL	75.000.000	65.765.500	4.232.500	6.44	70.586.000	94.13	
1.1.2	1.2.2.017	5. RETRIBUSI PENYEDOTAN WC	184.200.000	89.275.800	11.992.300	6.51	101.967.800	55.35	
1.1.2	1.2.2.018	6. RETRIBUSI RIMAH POTONG KEPALA	1.200.000	70.225.221.40	5.294.494	7.05	75.613.715.30	100.82	
1.1.2	1.2.2.019	7. RETRIBUSI USAHAKUHANAN	75.000.000	81.515.275	11.043.500	4.60	92.558.775	58.57	
1.1.2	1.2.2.020	8. RET. ANGGOTAN DAN PENTEREGANGAN SUNGAI	240.000.000	9.684.617.575	147.380.020	1.97	9.831.997.595	131.09	
1.1.2	1.2.2.021	9. RETRIBUSI ZIN MENDIRIKAN BANGUNAN	7.500.000.000	1.100.000.000	130.908.750	11.90	1.101.577.336	100.13	
1.1.2	1.2.2.022	10. RETRIBUSI ZIN GANGGUAN	150.000.000	147.520.000	12.635.000	8.42	160.155.000	106.77	
1.1.2	1.2.2.023	11. RETRIBUSI ZIN USAHA ANGRUTAN TRAYEK	100.000.000	109.350.000	7.750.000	7.75	117.119.000	117.11	
1.1.2	1.2.2.024	12. RETRIBUSI U.S.HA PERDAGANGAN	100.000.000	-	-	-	-	-	

KODE	JENIS PENERIMAAN	TARGET	REALISASI - PENERIMAAN			KETERANGAN
			SD BULAN LALU	BULAN INI	%	
1.1.2.1.03	RETRIBUSI UNTUK USAHA KONSTRUKSI	50.000.000	24.650.000	30.000	0.10	24.700.000
22	RETRIBUSI PENGURUTAN ADMINISTRASI LEGES	505.050.000	108.979.000	3.621.000	0.72	112.600.000
23	RETRIBUSI PEMB. KETENAGA KERJAAN	29.000.000	23.342.500	4.275.000	2.14	23.770.000
24	RETRIBUSI PENGETAHUAN DAN FENGAWASAN NCRMA	90.000.000	109.836.084	5.449.000	6.05	115.235.084
25	KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA					128.09
26	RETRIBUSI UNTUK PERUNTAKAN PENGUNAAN TANAH	50.000.000	36.945.750	-	-	36.945.750
27	RETRIBUSI UNTUK PENGUNAAN BANGUNAN	25.000.000	214.097.621	1.170.000	1.80	215.267.621
28	RETRIBUSI PEMBANGUNAN JASA USAHA KEPARIWIT SATUAN	163.491.000	109.744.000	7.300.000	4.47	117.044.000
	JUMLAH PENERIMAAN : 3		21.74.252.000	21.996.024.722.50	1.231.947.153	5.90
	C. BAGIAN LABA USAHA DAERAH			174.142.124.08	729.667.968	126.90
	BANK PEMBANGUNAN DAERAH	575.000.000			903.810.092.08	157.18
	JUMLAH PENERIMAAN : C	575.000.000	174.142.124.08	729.667.968	126.90	903.810.092.08
	D. LAIN-LAIN PENDAPATAN					157.18
1	1.1.4.3.01	HASIL PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH	18.103.800	5.645.075	-	5.645.075
2	1.1.4.3.02	JASA GIRO	460.000.000	324.910.102.25	17.206.924.55	31.18
3	1.1.4.3.03	PENERIMAAN GANTI RUGI ATAS KERUGIAN DAERAH (TP.TGR)	26.400.000	54.519.010	3.632.700	242.117.026.80
4	1.1.4.3.04	PENERIMAAN LAIN-LAIN	2.642.500.000	1.960.520.668.15	4.885.441.483.15	58.151.716
	1. BIAYA GALIAN JALAN	22.500.000	10.171.700	1.094.200	13.76	220.27
	2. BIAYA PENGAMBILAN KARCIS	"	225.000	-	-	-
	3. PENERIMAAN LAIN-LAIN	2.620.000.000	1.950.123.908.15	4.884.732.283.15	184.38	6.845.962.091.30
	4. PENERIMAAN LAIN-LAIN	"	-	-	3.15	10.650.900
	JUMLAH PENERIMAAN : D	3.147.003.800	2.345.594.795.40	4.906.281.107.70	155.90	255.000
	JUMLAH PENERIMAAN RUTIN ( A + B + C - D ) : PAD	44.926.484.400	45.221.632.883.48	8.814.797.687.20	19.62	7.251.873.903.10
						230.44
						54.036.430.570.68
						120.28

NO	KODE	JENIS PENERIMAAN	TARGET	REALISASI		PENERIMAAN		
				SD BULAN LALU	BULAN EN	%	SD BULANINI	%
I	1.3.1.001	E. BAGIHASIL PAJAK BUKAN PAJAK						KETERANGAN
a.	1.3.1.002	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)	22.324.194.300	22.161.275.114	3.978.995.853	17.82	26.140.268.972	117.09
b.	1.3.1.003	SEJA PEROLEHAN HES ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BEPBTB)	5.509.000.000	7.142.851.708	555.519.458	13.74	5.898.571.166	143.61
c.	1.3.1.004	PAJAK PENGGISILAN (PPH)	15.393.006.000	10.275.028.455	4.764.339.913	30.15	15.039.368.268	95.19
d.	1.3.1.005	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN SEJEMOTOR	6.644.606.800	3.247.935.607.57	2.345.222.085.44	28.77	5.591.157.691.01	92.50
e.	1.3.1.006	PAJAK KENDARAAN BERMOATOR	9.480.000.000	8.346.743.700	—	—	8.446.743.700	8.05
f.	1.3.1.007	PAJAK PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKIMAN	16.520.000.000	8.971.830.490	—	—	8.971.830.400	85.28
			\$29.000.000	—	—	—	—	—
II	1.3.2.001	E. BAGIHASIL BUKAN P-JAK						
a.	1.3.2.002	PERAN HASIL HUTAN (EH)	82.000.000	—	—	—	—	
b.	1.3.2.003	PERAN TETAP (PLANDRENT)	150.000.000	3.026.607	4.742.964	3.16	5.769.571	5.18
c.	1.3.2.004	a. PENERIMAAN DARI BPN	150.000.000	3.026.607	4.742.964	3.16	5.769.571	5.18
d.	1.3.2.005	b. PELUNASAN TANAH DIGARAP NEGERI RAKAT	—	—	—	—	—	
e.	1.3.2.006	MINYAK BLM	—	—	—	—	—	
f.	1.3.2.007	GAS ALAM	—	—	—	—	—	
g.	1.3.2.008	PERANCAYI KELAUTAN	20.674.311.248	5.216.397.318	19.77	—	25.890.708.566	98.10
h.	1.3.2.009	PERTAMBANGAN UMUM	8.617.000.000	4.944.085.384	1.092.501.101	12.68	6.035.586.485	70.05
i.	1.3.2.010	KUTUTANAN	—	—	103.537.753	—	105.337.753	—
j.	1.3.2.011	PENGBEBASAN HES TANAH NEGARA	1.283.285.500	—	—	—	1.233.285.500	38.76
k.	1.3.2.012	—	—	—	—	—	1.273.693.586.85	—
l.	1.3.2.013	—	—	—	—	—	4.107.791.558	—
m.	1.3.2.014	—	—	—	—	—	2.322	2.322
n.	1.3.2.015	—	—	—	—	—	1.273.693.586.85	—
o.	1.3.2.016	—	—	—	—	—	652.935.51	—
p.	1.3.2.017	—	—	—	—	—	268.30	268.30
q.	1.3.2.018	K.MLAH PENERIMAAN E	167.036.541.100	87.302.516.736.57	19.943.541.493.29	18.63	107.246.058.21.85	100.20

AYAT	JENIS PENDAFTARAN	T A R I H	PENGELUARAN		PENGEMBANGAN		KETERANGAN
			D BULAN LALU	BULAN INI	%	SD BULAN INI	
1.1.1	PENGELUARAN A. PAJAK DAERAH B. RETRIBUSI DARI C. LABA BADAN/NSALAH MELIK DAERAH D. LAIN-LAIN PENDAPATAN	19.470.238.600 21.724.252.000 575.360.060 3.147.003.800	20.725.871.241.50 21.296.034.722.50 174.142.124.05 245.594.795.40	1.896.901.478.50 1.281.947.133 729.557.568 4.936.221.107.70	9,74 5,90 126,90 155,90	22.602.772.720 23.277.971.835,50 903.810.092,08 7.251.875.903,10	115,09 107,10 157,18 230,44
1.1.2	JUMLAH A+B+C+D (P&D)	44.925.424.400	45.221.652.383,48	8.814.797.657,20	19,62	54.036.430.570,68	120,28
1.1.3	E. BAGI HASIL PAJAK / BURGAN PAJAK	107.036.541.110	87.322.516.736,57	19.943.541.493,29	18,63	107.246.058.229,86	100,20
	JUMLAH PENGEMBANGAN (A + B + C + D + E)	151.963.025.500	137.524.149.529,05	28.758.339.180,49	18,92	161.222.488.800,54	105,13

22 JANUARI 2003



12 SUSAN KEPADA YTH

1. GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN
2. KEPALA BADAN PENGAWAS PROPINSI SUMATERA SELATAN
3. ASISTEN I BIDANG PEMERINTAHAN SETDA SUMATERA SELATAN
4. KEPALA BIRO KEUANGAN SETDA SUMATERA SELATAN
5. KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH SUMATERA SELATAN
6. KEPALA BIRO PEMERINTAHAN UMUM SUMATERA SELATAN
7. KEPALA BADAN PENGAWAS KOTA PALEMBANG
8. KEPALA BAGIAN KEUANGAN KOTA PALEMBANG
9. KETUA KOMISI C DPRD KOTA PALEMBANG
10. REPARA KERJA SAMA NEGARA KOTA PALEMBANG
11. KEPALA PERWAKILAN SSK DI PALEMBANG

Arip \*

DAFTAR REALISASI PENERIMAAN DAERAH KOTA PALEMBANG  
TAHUN 2003  
UNTUK BULAN : JANUARI 2003 S/D DESEMBER 2003

RATIO :  $\frac{12 \times 100\%}{12} = 100\%$

NO	KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	TARGET SD BULAN LALU	REALISASI - PENDEMAN		SD BULANINI	%	KET.
				DULAN INI	%			
1.1	A. PAJAK DAERAH							
1 1.01.05.1.1.01	PAJAK HOTEL	2.995.240.000,00	2.377.935.247,00	386.438.231,00	12,90	2.764.373.478,00	92,29	
1 1.01.05.1.1.02	PAJAK RESTORAN	4.733.100.500,00	4.556.921.341,00	455.573.783,00	9,63	5.012.495.124,00	105,90	
2 1.01.05.1.1.03	PAJAK HIBURAN	1.003.325.500,00	978.264.716,00	52.899.307,00	5,25	1.031.164.023,00	102,26	
3 1.01.05.1.1.04	PAJAK REKLAME	1.189.547.600,00	1.155.894.337,00	71.633.239,00	6,02	1.227.527.626,00	103,19	
4 1.01.05.1.1.05	PAJAK PENERANGAN JALAN	13.000.000.000,00	13.748.390.701,25	1.544.512.790,00	11,88	15.292.903.491,25	117,64	
5 1.01.05.1.1.06	PAJAK PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOL. C	228.015.000,00	218.204.428,00	12.446.940,00	5,46	230.651.368,00	101,16	
6 1.01.05.1.1.06	PAJAK PARKIR	472.844.000,00	395.018.636,00	82.020.330,00	17,35	477.038.966,00	100,89	
7 1.01.05.1.1.07	JUMLAH PENERIMAAN : A	23.627.072.600,00	23.430.629.406,25	2.605.524.670,00	11,03	26.036.154.076,25	110,20	
1.2	B. RETRIBUSI DAERAH							
1 1.01.11.1.2.33	RETRIBUSI PUNGUTAN ADMINISTRASI (LEGES)	151.100.000,00	107.399.000,00	8.148.000,00	5,39	115.547.000,00	76,47	
2 1.02.01.1.2.15	RETRIBUSI PELELANGAN IKAN	85.000.000,00	68.894.930,00	7.760.306,00	9,13	76.655.236,00	90,18	
3 1.02.01.1.2.20	RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN	185.000.000,00	119.536.900,00	24.318.000,00	13,14	143.854.900,00	77,76	
4 1.02.01.1.2.40	RETRIBUSI JASA USAHA KEHUTANAN	75.000.000,00	73.310.075,00	2.446.100,00	3,26	75.756.175,00	101,01	
5 1.06.01.1.2.30	RETRIBUSI LANDA DAFTAR PERUSAHAAN	42.750.000,00	63.618.900,00	6.362.400,00	14,83	69.981.100,00	163,70	
6 1.06.01.1.2.31	RETRIBUSI IZIN PERDAGANGAN	110.000.000,00	133.550.069,00	10.200.050,00	9,27	143.750.000,00	130,68	
7 1.06.01.1.2.32	RETRIBUSI USAHA INDUSTRI	10.000.000,00	10.500.000,00	1.100.000,00	11,00	11.600.000,00	116,00	
8 1.06.02.1.2.08	RETRIBUSI PELAYANAN PUSAR	2.740.616.800,00	2.371.126.242,00	375.047.690,00	13,53	2.746.173.932,00	100,20	
9 1.08.01.1.2.28	RETRIBUSI IZIN GANGGUAN	1.250.000.000,00	1.692.990.815,00	161.263.250,00	12,03	1.542.254.052,00	100,34	
10 1.09.01.1.2.34	RETRIBUSI PENIP. KETENAGAKERJAAN	25.000.000,00	21.027.500,00	1.350.000,00	5,40	22.377.562,00	89,51	
11 1.09.01.1.2.35	RET PENG. DAN PENG. NORMA KESEL.	115.000.000,60	79.391.497,50	10.673.650,00	9,23	10.064.547,50	78,32	
	DAN KESЕHATAN KERJA							
12 1.10.01.1.2.01	RETRIBUSI PELAYANAN KESЕHATAN	1.123.750.000,00	912.089.175,00	287.665.000,00	24,63	1.199.754.475,00	102,72	
13 1.10.02.1.2.43	RET PEL. KES. RSUD PALEMBANG SRI	545.000.000,00	374.037.982,00	105.165.379,00	19,30	479.203.352,00	87,93	
14 1.13.01.1.2.11	RETRIBUSI PENGENDIKTAN BANGUNAN	103.000.000,00	72.515.600,00	4.950.000,00	4,95	77.465.000,00	77,47	
15 1.13.01.1.2.26	RETRIBUSI MENDIRIKAN BANGUNAN	9.500.000,00	8.601.199.230,00	964.348.200,00	10,15	9.565.547.430,00	100,69	
16 1.13.01.1.2.36	RETRIBUSI PENGGUNAAN BANGUNAN	60.000.000,00	30.000.000,00	-	-	30.000.000,00	50,00	
17 1.13.01.1.2.37	RETRIBUSI PENGGUNAAN ALAT PK	150.000.000,00	101.592.840,00	37.920.000,00	24,63	104.592.840,00	69,71	
18 1.14.01.1.2.10	RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PK	110.000.000,00	84.011.547,50	9.779.475,00	8,32	93.791.022,50	85,26	
19 1.15.01.1.2.12	RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	72.000.000,00	72.566.000,00	7.518.000,00	10,44	30.984.000,00	111,23	
20 1.15.01.1.2.42	RETRIBUSI IZIN JASA KONSTRUKSI	40.000.000,00	40.838.500,00	5.125.000,00	12,81	45.963.500,00	114,91	

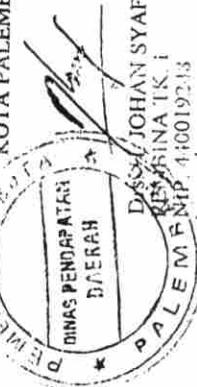
NO	KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	TARGET	REALISASI PENERIMAAN		%	S.D BULANINI	%	S.D KET.
				S/D BULAN LALU	BULANINI				
21	1.15.01.1.2.33	RETRIBUSI ZIN PENGUTAN KUALITAS BANGUN	22.000.000,00	11.000.000,00	20.000.000,00	66,67	31.300.000,00	103,33	
22	1.15.21.1.2.07	RETRIBUSI PARKIR DI TEPIJALAN UMUM	2.752.000.000,00	2.115.567.350,00	219.489.000,00	7,98	2.335.056.350,00	84,85	
23	1.16.01.1.2.09	RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	2.000.000.000,00	1.318.901.940,00	208.630.060,00	10,43	2.027.532.000,00	101,38	
24	1.16.01.1.2.16	RETRIBUSI TERMINAL	1.200.000.000,00	1.004.643.900,00	168.632.550,00	14,05	1.173.276.450,00	97,77	
25	1.16.01.1.2.23	RETRIBUSI JASA ANGKUTAN PENYEBERANGAN	240.000.000,00	151.263.577,90	16.503.500,00	6,88	167.767.077,90	69,90	
26	1.16.01.1.2.29	RETRIBUSI ZIN TRAYEK	200.000.000,00	150.425.000,00	17.765.000,00	8,83	168.190.000,00	84,10	
27	1.16.01.1.2.41	RETRIBUSI PEMBINAAN PERHUBUNGAN UDARA DAN TELEKOMUNIKASI	50.000.000,00	8.205.000,00	-	-	8.205.000,00	16,41	
28	1.16.02.1.2.40	RETRIBUSI PEMBINAAN PEMANFAATAN MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI	15.000.000,00	11.575.000,00	525.000,00	3,50	12.100.000,00	80,67	
29	1.17.01.1.2.02	RETRIBUSI PERSAMPAHAN KEBERSIHAN	1.316.500.000,00	816.412.600,00	70.470.000,00	5,27	886.882.600,00	66,36	
30	1.17.01.1.2.05	RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN	21.487.500,00	12.828.700,00	1.222.250,00	5,69	14.050.950,00	65,39	
31	1.17.01.1.2.06	RETRIBUSI PELAYANAN PENGABUAN MAYAT	29.700.000,00	8.630.000,00	1.650.000,00	5,56	10.280.000,00	34,61	
32	1.17.01.1.2.19	RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS	75.000.000,00	59.338.500,00	8.922.500,00	11,90	68.261.000,00	91,01	
33	1.17.02.1.2.24	RETRIBUSI JASA USAHA PENGOLAHAN LIMBAH CAIR	690.000.000,00	455.799.221,00	130.067.825,00	21,68	585.867.046,00	97,64	
34	1.18.01.1.2.03	RETRIBUSI PENGGUNAAN BIAYA CETAK KTP	825.000.000,00	933.560.850,00	80.779.250,00	9,79	1.014.340.100,00	122,95	
35	1.18.01.1.2.04	RETRIBUSI PENGGUNAAN BIAYA CETAK AKTA KEL.	385.000.000,00	322.720.000,00	21.183.250,00	5,50	343.903.250,00	89,33	
36	1.18.01.1.2.38	RETRIBUSI USAHA KEPARIWISATAAN	175.000.000,00	122.561.250,00	23.053.500,00	13,17	145.614.750,00	83,21	
		JUMLAH PENERIMAAN : B		26.469.154.300,00	22.436.629.322,00	2.982.113.526,00	11,27	25.418.742.848,00	96,03
1	1.03.1.3.02.01	1.3 BAGIAN LABA USAHA DAERAH BANK PEMBANGUNAN DAERAH	1.000.000.000,00	308.541.607,00	763.863.636,00	76,89	1.077.105.243,00	107,74	
		JUMLAH PENERIMAAN : C	1.000.000.000,00	308.541.607,00	763.863.636,00	76,89	1.077.405.243,00	107,74	
1.4	1.4.1	1.4.1 LAIN-LAIN PENDAPATAN	1.412.283.500,00	161.101.950,00	-	-	-	-	
1	1.03.1.1.01.01	HASH PENJUALAN BARANG MILIT DAERAH	460.000.000,00	52.196.339,40	21.491.645,90	4,67	161.101.950,00	114,03	
2	1.03.1.4.02.01	JASA GIRO	2.800.000.000,00	2.589.333.332,00	1.5.733.335,90	13,17	120.687.884,40	26,24	
3	1.03.1.1.05.01	PENGERIMAAAN BAGI DEPGSTO (PDPSS)	37.606.000,00	66.019.200,00	10.444.200,00	28,23	2.968.060.00	106,60	
4	1.03.1.1.07.01	PENERIMAAN GANTI RUGI ATAS KEKAYAAN DAERAH (TPTRGR)	9.628.758.300,00	10.392.728.436,00	88.280.866,00	0,92	10.931.009.346,00	114,04	
5	1.03.1.4.07.03	PENERIMAAN LAIN-LAIN	300.000.000,00	236.212.910,00	75.972.682,00	25,32	312.185.592,00	104,06	
6	1.01.03.3.1.01.01	KELEBIHAN PEMBAYARAN GAJI	1.328.1.041.30,00	14.651.592.717,40	564.922.122,00	4,23	14.619.514.329,40	109,57	
		JUMLAH PENERIMAAN : D	1.328.1.041.30,00	14.651.592.717,40	564.922.122,00	4,23	14.619.514.329,40	109,57	
		JUMLAH PENERIMAAN : D + E + F	64.163.268.700,00	60.230.393.052,55	5.921.423.954,00	10,74	67.151.317.005,65	104,17	

NO	KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	TARGET	REALISASI PENERIMAAN		S/D BULAN JUNI	%	S/D BULAN JUNI	%	KET.
				S/D JULIAN LALU	BULAN JN1					
2	E. BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK BAGI HASIL PAJAK :									
1	1.03.2.1.01.03	BAGI HASIL PAJAK PPH 21	16.850.682,10.00	142.647.9293,00	6.972.785.453,00	41,36	21.179.264.746,00	125,61		
2	1.03.24.C1.01	PAJAK KENDARAAN BERMOGOR	13.000.000.000,00	6.325.444.333,00	-	-	6.325.444.333,00	48,66		
3	1.03.2.4.01.03	BEA BALIK NAMA (BBNK)	16.000.000.000,00	6.767.346.867,00	-	-	6.767.346.867,00	42,30		
4	1.03.2.4.01.05	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOGOR	8.000.000.000,00	2.358.971.378,00	-	-	2.358.971.378,00	29,49		
5	1.03.2.4.01.06	PAJAK PENGAMBILAN AIR PERMUKAAN & ABT	800.000.000,00	435.428.900,00	-	-	435.428.900,00	54,43		
6	1.05.2.1.01.01	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN	26.000.000.000,00	24.434.794.147,00	4.861.269.533,00	18,70	29.296.063.680,00	112,68		
7	1.05.2.1.01.02	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	7.000.000.000,00	7.365.825.133,00	1.498.723.036,00	21,41	8.864.548.169,00	126,64		
		BAGI HASU, BUKAN PAJAK								
1	1.03.2.1.02.01	IURAN HASIL HUTAN (IHH)	229.899.500,00	-	28.045.000,00	12,20	-	28.045.000,00	12,20	
2	1.03.2.1.02.03	IURAN TETAP (LANDRENT)	150.000.000,00	-	-	-	-	-	-	
3	1.03.2.1.02.08	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI	21.900.000.000,00	17.476.563.889,00	331.437.877,00	20,82	21.828.036.766,00	104,44		
4	1.03.2.1.02.09	PERAMBANGAN GAS ALAMI	4.537.060.000,00	-	1.047.645.313,00	22,59	1.017.645.313,00	22,59		
5	1.03.2.1.02.19	PERAMBANGAN BATU M	1.666.368.000,00	1.411.953.720,00	695.694.683,00	41,75	2.137.645.403,00	128,28		
6	1.03.2.1.01.11	KUTANAN	252.631.575,00	737.234.512,C0	-	-	939.865.937,00	-		
7	1.03.2.1.01.12	PERKANAN	957.446.800,00	120.919.913,00	148.204.343,00	15,18	339.124.256,00	35,42		
		JUMLAH S/ER. JAWA : E	113.201.374.440,00	31.256.391.248,00	20.341.039.550,00	17,50	101.597.430.793,00	37,43		

NO	KODE BULAN	JENIS PENERIMAAN	TARGET	JUMLAH PENERIMAAN	SD BUDAYA	SD KULTUREL
1	1.1	A. PAJAK DAERAH	23.627.072.600,00	23.430.629.406,25	2.605.524.676,00	11.03
2	1.2	B. RETRIBUSI DAERAH	26.469.154.300,00	22.436.629.322,00	2.982.113.526,00	11.27
3	1.2	C. LABA BADAN USAHA MILIK NEGARA	1.000.000.000,00	308.541.607,00	768.863.636,00	76,89
4	1.4	D. LAIN-LAIN PENDAPATAN	13.367.041.800,00	14.054.592.717,40	564.922.122,00	4,23
		JUMLAH A + B + C + D (PAD)	64.463.268.700,00	60.230.393.052,65	7.971.723.941,00	10,4
5	2	E. BAGI HASIL PAJAK / BUKAN PAJAK	116.201.394.700,00	81.256.391.248,00	20.341.039.550,00	17,50
		JUMLAH PENERIMAAN (A + B + C + D + E)	180.664.663.400,00	141.186.784.300,65	27,26	15,09
					168.779.473.865	15,40

PALEMBANG, 9 / JANUARI 2004

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KOTA PALEMBANG



Dinas Pendapatan Daerah

Kota Palembang

Dis. Johan Syafri W, MM



WALIKOTA PALEMBANG  
WAKIL  
MENGETAHUI



MENGETAHUI

TENGUSAN / EP ADA YTH

1. GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN
2. KEPALA BADAN PENGAWAS PROVINSI SUMATERA SELATAN
3. ASISTEN I BIDANG PEMERINTAHAN SE IDA SUMATERA SELATAN
4. KEPALA BIRO KEGIATAN SETDA SUMATERA SELATAN
5. KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
6. KEPALA BIRO PEMERINTAHAN UMIUM SUMATERA SELATAN
7. KEPALA BADAN TENGAWAS KOTA PALEMBANG
8. KEPALA BAGIAN KEUANGAN KOTA PALEMBANG
9. KETUA KOMISI II DPRD KOTA PALEMBANG
10. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG
11. KEPALA PERWAKILAN II BPK DI PALEMBANG

DAFTAR REALISASI PENERIMAAN DAERAH KOTA PALEMBANG  
 TAHUN : 2004  
 UNIK BULAN : JANUARI S/D DESEMBER 2004

RATIO :  $\frac{12}{12} \times 100 = 100\%$

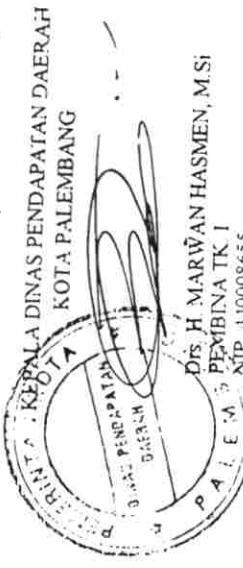
NO	KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	TARGET	REALISASI - PENERIMAAN		% S/D BULANINI	% KET.
				S/D BULAN LALU	BULANINI		
1.1	A. PAJAK DAERAH						
1	1.01.05.1.1.01	PAJAK HOTEL	5.271.000.000,00	2.787.512.556,00	415.091.412,00	7,81	3.201.125.002,30
2	1.01.05.1.1.02	PAJAK RESTORAN	6.794.220.400,00	5.536.195.619,00	612.577.473,00	9,02	6.145.773.092,00
3	1.01.05.1.1.03	PAJAK HIBURAN	1.523.583.000,00	1.295.220.526,00	114.845.636,00	7,54	1.410.066.162,00
4	1.01.05.1.1.04	PAJAK REKLAME	2.050.417.282,00	2.070.419.893,00	88.059.724,00	4,29	2.158.479.617,00
5	1.01.05.1.1.05	PAJAK PENGERANGAN JALAN	22.400.000.000,00	16.182.289.893,75	1.960.445.993,75	8,48	18.082.735.887,50
6	1.01.05.1.1.06	PAJAK PENGOLOLAHAN BAHAN GALLIAN GOL. C	299.785.000,00	337.235.092,00	35.792.720,00	11,94	373.027.812,00
7	1.01.05.1.1.07	PAJAK PARKIR	1.000.000.000,00	418.472.460,00	51.521.300,00	8,15	529.993.766,00
	JUMLAH PENERIMAAN : A		39.339.006.682,00	28.656.866.073,75	3.246.334.258,75	8,25	31.903.200.332,50
1.2	B. RETRIBUSI DAERAH						
1	1.01.11.1.2.33	RETRIBUSI PUNGUTAN ADMINISTRASI (LEGES)	136.600.000,00	84.638.000,00	9.246.000,00	6,77	93.884.000,00
2	1.02.01.1.2.15	RETRIBUSI PELELANGAN IKAN	85.000.000,00	70.663.864,00	8.462.809,00	9,96	79.126.675,00
3	1.02.01.1.2.20	RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN	185.000.000,00	130.128.000,00	33.715.500,00	18,22	163.843.500,00
4	1.02.01.1.2.40	RETRIBUSI JASA USAHA KEHUTANAN	75.000.000,00	70.778.600,00	4.829.300,00	6,44	75.607.900,00
5	1.02.01.1.2.41	RETRIBUSI PENG & PENGELOLAAN SARANG WALET	75.000.000,00	-	-	-	-
6	1.06.01.1.2.30	RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN	75.000.000,00	80.527.000,00	6.231.300,00	8,31	86.758.300,00
7	1.06.01.1.2.31	RETRIBUSI ZIN PERDAGANGAN	150.000.000,00	150.950.000,00	11.100.000,00	7,40	162.050.000,00
8	1.06.01.1.2.32	RETRIBUSI USAHA INDUSTRI	12.500.000,00	5.625.000,00	2.775.000,00	22,20	8.400.000,00
9	1.06.02.1.2.08	RETRIBUSI PELAYANAN PASAR	4.104.488.700,00	2.941.235.099,00	267.116.288,00	6,51	3.208.351.387,00
10	1.06.02.1.2.14	RETRIBUSI PERPASARAN SWASTA	48.000.000,00	20.577.000,00	13.743.000,00	28,63	34.320.020,00
11	1.08.01.1.2.28	RETRIBUSI ZIN GANGGUAN	1.400.000.000,60	2.185.975.610,00	99.936.530,00	7,14	2.285.912.140,00
12	1.09.01.1.2.41	RET PEMB DAN PENG S. NORMA KLSFLAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	115.000.000,00	94.861.239,00	14.970.200,00	13,02	109.831.439,00
13	1.09.01.1.2.42	RET PEMB PERUSAHAAN DAN KETENAGAKERJAAN	35.000.000,00	29.409.500,00	2.065.500,00	5,90	31.475.000,00
14	1.10.01.1.2.38	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN	1.215.334.300,00	1.180.241.275,00	253.684.200,00	20,87	1.433.925.475,00
15	1.10.02.1.2.01	RETRIBUSI KES RSUD PALEMBANG BARI	600.000.000,00	797.626.276,00	40.661.259,00	6,78	838.289.526,00
16	1.12.01.1.2.42.01	RETRIBUSI INPUT	10.000.000,00	8.650.000,00	625.000,00	6,25	9.275.000,00
17	1.12.01.1.2.42.02	RETRIBUSI PANGKAS RAMBUT	12.500.000,00	10.690.000,00	1.175.000,00	9,40	11.865.000,00
18	1.13.01.1.2.11	RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA	100.000.000,00	80.885.000,00	11.960.000,00	11,96	92.845.000,00
19	1.13.01.1.2.26	RETRIBUSI MENDIKAN BANGUNAN	11.500.000.000,00	7.713.951.845,00	2.024.643.800,00	17,61	9.738.595.645,00
20	1.13.01.1.2.36	RETRIBUSI ZIN PENGGUNAAN TANAH	60.000.000,00	-	-	-	-
21	1.13.01.1.2.37	RETRIBUSI ZIN PENGGUNAAN BANGUNAN	150.000.000,00	178.540.975,00	324.220,00	0,22	178.865.195,00
22	1.14.01.1.2.10	RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PBK	130.000.000,00	100.335.815,00	11.853.780,00	9,12	112.189.595,00

NO	KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	TARGET	REALISASI - PENERIMAAN		% S/D BULANINI	%	KET.	
				S/D BULAN LALU	BULAN INI				
23	1.12.01.1.2.13	RETRIBUSI PEMAKALAN KEKAYAAN DAERAH	135.000.000,00	82.392.000,00	6.250.000,00	4,63	88.642.000,00	65,66	
24	1.15.01.1.2.31	RETRIBUSI IZIN JASA KONSTRUKSI	50.000.000,00	70.283.000,00	3.500.000,00	7,00	73.783.000,00	147,57	
25	1.15.01.1.2.34	RET. GALLIAN PAHL TELKOM, G.S. LISTRIK, GOL. C	25.000.000,00	13.696.500,00	1.510.000,00	6,04	15.206.500,00	60,83	
26	1.16.01.1.2.07	RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM	1.150.000.000,00	1.965.995.500,00	266.727.700,00	9,47	2.232.723.200,00	70,88	
27	1.16.01.1.2.09	RETRIBUSI PENGETAHUAN KENDARAAN BERMOGOR	2.250.000.000,00	1.912.251.140,00	220.619.040,00	9,81	2.132.890.180,00	94,80	
28	1.16.01.1.2.16	RETRIBUSI TERMINAL	1.250.000.060,00	1.264.616.125,00	125.531.000,00	10,04	1.390.147.125,00	111,21	
29	1.16.01.1.2.23	RETRIBUSI JASA ANGKUTAN PENYEBERANGAN	265.000.060,00	246.351.200,00	35.568.750,00	13,42	281.913.550,00	106,38	
30	1.16.01.1.2.29	RETRIBUSI IZIN TRAYEK	200.000.000,00	159.250.000,00	14.440.000,00	7,22	173.690.000,00	86,85	
31	1.16.01.1.2.39	RETRIBUSI PENGETAHUAN PERHUBUNGAN UDARA DAN TELEKOMUNIKASI	50.000.000,00	4.970.000,00	985.000,00	1,97	5.955.000,00	11,91	
32	1.16.01.1.2.45	RETRIBUSI BECA	75.000.000,00	64.030.000,00	360.000,00	0,48	64.390.000,00	85,85	
33	1.16.02.1.2.40	RETRIBUSI PENIBINAAN PEMANFAATAN MEDIA INFORMASI DAN KONSEP KUKUSASI	15.000.000,00	11.475.000,00	-	-	11.475.000,00	76,50	
34	1.17.01.1.2.02	RETRIBUSI PERSAMAAN KEBERSIHAN	1.403.325.000,00	883.640.000,00	116.368.000,00	8,29	1.000.008.000,00	71,26	
35	1.17.01.1.2.05	RETRIBUSI PELAYANAN PENAKAMAN	21.487.500,00	13.734.900,00	904.750,00	4,21	14.639.629,00	68,13	
36	1.17.01.1.2.06	RETRIBUSI PELAYANAN PENGUBURAN MAYAT	29.780.000,00	8.500.000,00	1.000.060,00	3,37	9.500.000,00	31,59	
37	1.17.01.1.2.19	RETRIBUSI PENYEDOTAN TINA	75.000.000,00	66.453.000,00	8.581.500,00	11,44	75.034.500,00	100,05	
38	1.17.02.1.2.13	RETRIBUSI SEWA LABORATORIUM	15.000.000,00	15.418.825,00	173.000,00	1,15	15.591.825,00	103,95	
39	1.17.02.1.2.24	RETRIBUSI JASA USAHA PENGOLAHAN LIMBAH CAIR	760.000.000,00	579.509.422,00	65.462.329,00	8,61	644.971.751,00	84,86	
40	1.18.01.1.2.03	RETRIBUSI PENGELUARAN BIAYA CETAK KTP	875.000.000,00	824.725.900,00	79.639.650,00	9,10	904.365.550,00	103,36	
41	1.18.01.1.2.04	RETRIBUSI PENGELUARAN BIAYA CETAK AKTA	385.000.000,00	261.145.500,00	19.415.250,00	5,04	280.560.750,00	72,87	
42	1.18.01.1.2.38	RETRIBUSI USAHA KEPARIWISATAAN	175.000.000,00	148.214.550,00	29.009.020,00	16,58	177.223.570,00	101,27	
		JUMLAH PENERIMAAN : B		31.478.935.500,00	24.532.942.660,00	3.815.185.666,00	12,12	28.348.128.326,00	90,05
	1.3	C. BAGIAN LABA USAHA DAERAH							
1	1.03.1.3.02.01	BANK PEMBANGUNAN DAERAH	1.000.000.000,00	-	-	-	-	-	
		JUMLAH PENERIMAAN : C	1.000.000.000,00	-	-	-	-	-	
	1.4	D. LAIN-LAIN PENDAPATAN							
1	1.01.03.1.4.01	HASIL PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH	141.283.500,00	330.737.500,00	90.000,00	0,64	331.637.500,00	234,73	
2	1.01.03.1.4.02	JASA GIRO	460.000.000,00	348.517.602,00	41.276.038,00	8,97	389.793.690,00	84,74	
3	1.01.03.1.4.05	PENERIMAAN BAG DEPOSITO (BP2CC)	800.000.000,00	326.125.059,00	15.275.010,00	1,91	341.400.069,00	42,68	
4	1.01.03.1.4.06	PENERIMAAN GANTI RUGI ATAS KEKAYAAN DAERAH (IP/TGR)	37.000.000,00	47.889.857,00	3.146.500,00	8,50	51.036.357,00	137,94	
5	1.01.03.1.4.07	PENERIMAAN LAIN-LAIN	2110.946.300,00	5.376.733.753,00	70.342.017,00	3,33	5.447.075.770,00	258,04	
		JUMLAH PENERIMAAN : D	3.549.229.800,00	6.430.003.771,00	130.939.615,00	3,69	6.560.943.386,00	184,86	
		JUMLAH PENERIMAAN RUTIN (A + B + C + D) / PAD	75.367.171.982,00	59.678.812.504,75	7.192.459.539,75	9,54	66.812.272.044,50	88,65	

KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	TARGET	REALISASI PENERIMAAN	SD BULAN LALU	SD BULANINI	% KET.
						%
2	E. BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK BAGI HASIL PAJAK :					
1	1.03.2.1.01.03	PAJAK HASIL PAJAK PPH 21	22.629.346.000,00	23.123.285.199,00	-	23.123.285.199,00 102,18
2	1.03.2.4.01.01	PAJAK KENDARAAN BERMOGOR	21.000.000.030,00	4.182.826.275,00	-	4.182.826.275,00 19,92
3	1.03.2.4.01.03	BEA BALIK NAMA (BBNK3)	25.820.000.000,00	4.929.180.725,00	-	4.929.180.725,00 19,09
4	1.03.2.4.01.05	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOGOR	10.584.000.000,00	3.517.986.666,00	-	3.517.986.666,00 33,24
5	1.03.2.4.01.06	PAJAK PENGAMBILAN AIR PERMUKAAN & ABT	720.030.000,00	408.863.425,00	1.042.985,00	409.906.410,00 56,93
6	1.05.2.1.01.01	PAJAK BUMD DAN BANGUNAN	30.411.697.800,00	24.286.586.533,00	11.367.605.543,00	37.38 35.654.192.076,00 117,24
7	1.05.2.1.01.02	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	8.100.000.000,00	9.975.959.381,00	1.550.903.112,00	19,15 11.526.862.493,00 142,31
	BAGI HASIL BUKAN PAJAK					
1	1.03.2.1.02.01	IURAN HASIL HUTAN (IHH)	229.899.500,00	11.903.359,00	197.135.924,00	85,75 209.039.283,00 90,93
2	1.03.2.1.02.03	IURAN TETAP (LANDRENT)	150.000.000,00	-	-	-
3	1.03.2.1.01.12	PERIKANAN	937.446.800,00	-	157.520.793,00	16,45 157.520.783,00 16,45
4	1.03.2.1.02.08	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI	11.458.000.000,00	13.453.378.965,00	6.343.108.283,00	55,36 19.796.487.248,00 172,77
5	1.03.2.1.02.09	PERTAMBANGAN GAS ALAM	18.272.000.000,00	11.106.794.404,00	5.720.402.444,00	31,31 16.827.196.848,00 92,09
6	1.03.2.1.02.10	PERTAMBANGAN UMUM	1.666.368.000,00	2.019.278.660,00	-	2.019.278.660,00 121,18
	JUMLAH PENERIMAAN : E		151.998.758.100,00	97.016.043.592,00	25.337.719.074,00	16,67 122.353.762.666,00 86,50

NO	KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	TARGET		REALISASI - PENERIMAAN		% S/D BULAN INI	%	KET.
			S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN LALU	BULAN INI			
1	1.1	A. PAJAK DAERAH	39.339.006,682,00	28.656.866,073,75	5.246.334,258,75	8,25	31.903.200,332,50	81,10	
2	1.2	B. RETRIBUSI DAERAH	31.478.935,500,00	24.532.942,660,00	3.815.185,666,00	12,12	28.348.128,326,00	90,05	
3	1.3	C. LABA BADAN USAHA MILIK DAERAH	1.000.000,000,00	-	-	-	-	-	
4	1.4	D. LAIN-LAIN PENDAPATAN	3.549.229,890,00	6.430.003,771,00	130.939.615,00	3,69	6.560.943,325,00	184,86	
		JUMLAH A + B + C + D (PAD)	75.367.171,982,00	59.619.812,504,75	7.192.459.539,75	9,54	66.812.272,044,50	88,65	
5	2	E. BAGI HASIL PAJAK / BUKAN PAJAK	151.998.758,100,00	97.016.043,592,00	25.337.719,074,00	16,67	122.353.762,666,00	80,50	
		JUMLAH PENERIMAAN (A + B + C + D + E)	227.365.930,082,00	156.635.856,096,75	32.530.178,613,75	14,31	189.166.034.710,50	83,20	

PALEMBANG, 24 JANUARI 2005



MENGETAHU  
WILAYAH KOTA PALEMBANG



TEMBUSAN KEPADA YTH:

1. GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN
2. KEPALA BADAN PENGAWAS PROVINSI SUMATERA SELATAN
3. ASISTEN I BIDANG PEMERINTAHAN SETDA SUMATERA SELATAN
4. KEPALA BIRO KEUANGAN SETDA SUMATERA SELATAN
5. KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
6. KEPALA BIRO PEMERINTAHAN UMUM SUMATERA SELATAN
7. KEPALA BADAN PENGAWAS KOTA PALEMBANG
8. KEPALA BAGIAN KEUANGAN KOTA PALEMBANG
9. KETUA KOMISI C DPRD KOTA PALEMBANG
10. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG



DAFTAR : REALISASI PENERIMAAN BUDGET RAHKOTA PALEMBANG  
 TAHUN : 2005  
 UNTUK BULAN : JANUARI S/D DESEMBER 2005

$$\frac{12}{12} \times 100 = 100\%$$

No	KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	TARGET	REALISASI - PENERIMAAN		% S/D BULAN IRI	%	KET.
				S/D BULAN LALU	BULAN IRI			
<b>1.1. A. PAJAK DAERAH</b>								
1	1.01.05.1.1.01	PAJAK HOTEL	4.100.000.000,00	4.126.165.107,00	490.050.026,00	11,95	4.126.245.223,30	100,64
2	1.01.05.1.1.02	PAJAK RESTORAN	8.000.000.000,00	6.434.207.861,00	308.149.129,00	10,10	7.292.356.990,00	91,15
3	1.01.05.1.1.03	PAJAK HIBURAN	1.750.000.000,00	1.354.859.077,00	198.435.476,00	11,34	1.553.294.553,00	88,76
4	1.01.05.1.1.04	PAJAK REKLAME	3.000.000.000,00	2.671.400.030,00	331.665.434,00	11,06	3.003.065.464,00	100,17
5	1.01.05.1.1.05	PAJAK PENGERANGAN JALAN	26.000.000.000,00	18.633.883.974,00	1.927.916.042,00	7,42	20.561.800.016,00	79,08
6	1.01.05.1.1.06	PAJAK PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOL. C	500.000.000,00	493.986.841,00	56.624.495,00	11,32	550.611.336,00	110,12
7	1.01.05.1.1.07	PAJAK PARKIR	750.000.000,00	711.832.960,00	63.495.600,00	8,47	775.328.560,00	103,38
		JUMLAH PENERIMAAN : A	44.100.000.000,00	33.986.335.940,00	3.876.366.202,00	8,79	37.862.702.142,00	85,86
<b>1.2. B. RETRIBUSI DAERAH</b>								
1	1.01.11.1.2.33	RETRIBUSI PUNGUTAN ADMINISTRASI (LEGES)	200.000.000,00	105.598.000,00	11.108.000,00	5,55	116.706.000,00	58,35
2	1.02.01.1.2.15	RETRIBUSI PEMBINAAN USAHA PERIKANAN	100.000.000,00	102.497.396,00	10.592.057,00	10,59	113.089.453,00	113,09
3	1.02.01.1.2.20	RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN	343.000.000,00	279.880.000,00	24.530.000,00	7,15	304.410.000,00	88,75
4	1.02.01.1.2.40	RETRIBUSI USAHA HASIL KEHUTANAN	85.000.000,00	53.453.350,00	6.089.800,00	7,16	59.543.150,00	70,05
5	1.02.01.1.2.41	RETRIBUSI PENG & PENGELOLAAN SARANG WALET	75.000.000,00	-	-	-	-	-
6	1.06.01.1.2.30	RET. PENERIMAAN TANDA DAFLAR PERUSAHAAN	125.000.000,00	100.549.300,00	9.405.800,00	7,52	109.955.100,00	87,96
7	1.06.01.1.2.31	RETRIBUSI ZIN PENERIMAAN SU PERDAGANGAN	350.000.000,00	234.650.000,00	18.150.000,00	5,19	252.800.000,00	72,23
8	1.06.01.1.2.32	RETRIBUSI PENERIMAAN USAHA INDUSTRI	25.000.000,00	13.406.500,00	2.637.500,00	10,55	16.044.000,00	64,18
9	1.06.01.1.2.33	RET. PEN. PPBM&NON MIGAS (BHN MIGAS & NON MIGAS)	130.000.000,00	159.372.380,00	4.367.450,00	3,36	163.759.830,00	125,95
10	1.06.01.1.2.08	RETRIBUSI PELAYANAN PASAR	4.225.951.000,00	2.182.127.183,00	258.915.126,00	6,13	2.441.042.309,00	57,76
11	1.06.02.1.2.14	RETRIBUSI PERPASARAN SWASTA	66.800.000,00	54.273.000,00	1.300.000,00	2,25	35.773.000,00	53,55
12	1.08.01.1.2.28	KELIKIBUSI IZIN GANGGUAN	1.700.000.000,00	1.477.885.607,00	235.522.070,00	13,85	1.715.407.677,00	100,79
13	1.09.01.1.2.41	RET. PEMB. DAN PENG. NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	135.000.000,00	126.177.117,00	12.053.800,00	8,93	138.230.917,00	102,39
14	1.09.01.1.2.42	RET. PEMB. PERUSAHAAN DAN KETENAGAKERJAAN	65.000.000,00	44.255.000,00	4.895.000,00	7,53	49.150.000,00	75,62
15	1.10.01.1.2.38	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN	3.500.000.000,00	1.921.258.855,00	323.134.879,00	9,23	2.244.393.725,00	64,13
16	1.10.02.1.2.01	RETRIBUSI KES. RSUD PALEMBANG BARU	1.750.000.000,00	2.195.211.315,00	756.433.125,00	43,22	2.951.644.440,00	168,67
17	1.12.01.1.2.42.01	RETRIBUSI PPUT, PPUM	12.500.000,00	13.175.000,00	100.000,00	0,80	13.275.000,00	106,20
18	1.12.01.1.2.42.02	RETRIBUSI PANGKAS RAMBUT DAN SALON	13.500.000,00	12.945.000,00	75.000,00	0,56	13.020.000,00	96,44
19	1.13.01.1.2.11	RETRIBUSI PENGANTIAN BIAYA CETAK PETIA	250.000.000,00	102.875.000,00	7.455.000,00	2,98	110.330.000,00	44,13

KODE REKRDING	JENIS PENERIMAAN	TARGET	REALISASI BULAN ANNUAL	ASU PENERIMAAN	SD BULAN ANNUAL	KIT
					SD BULAN INI	
20 1.13.01.1.2.26	RETRIBUSI MENDIRIKAN BANGUNAN /	19.000.000.000,00	16.397.953.000,00	883.234.400,00	4,65	17.281.187.400,00
21 1.13.01.1.2.36	RETKEBUSI PENGGUNAAN TANAH	100.000.000,00	60.453.000,00	23.817.000,00	23,82	84.270.000,00
22 1.13.01.1.2.37	RET. PEMBINAAN DAN PENYELINGCARAAN REKLAME	650.000.000,00	519.988.665,00	125.915.548,00	19,37	645.904.616,00
23 1.14.01.1.2.10	RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT TBK	250.000.000,00	122.393.562,00	13.024.530,00	5,21	135.418.140,00
24 1.15.01.1.2.13	RETRIBUSI ALAT BERAT	90.000.000,00	5.870.000,00	-	5.870.000,00	54,17
25 1.15.01.1.2.14	RETRIBUSI LABORATORIUM	60.000.000,00	49.750.000,00	35.750.000,00	59,38	85.500.000,00
26 1.15.01.1.2.31	RETRIBUSI IZN USAHA JASA KONSTRUKSI (IJK)	200.000.000,00	127.687.500,00	2.150.000,00	1,98	129.637.500,00
27 1.15.01.1.2.31	RET. PEMB. & RET. PENGENDA. PEMANFAATAN RAWA	150.000.000,00	189.953.500,00	-	189.953.500,00	64,54
28 1.15.01.1.2.34	RET. GALLIAN PAM, TELESKOM, GAS, LISTRIK, GOL. C	100.000.000,00	16.904.000,00	1.937.000,00	1,94	18.841.000,00
29 1.16.01.1.2.07	RETRIBUSI PARKIR DI TEPITJALAN UMUM	5.036.000.000,00	2.399.680.000,00	89.279.500,00	1,77	2.488.959.500,00
30 1.16.01.1.2.09	RETRIBUSI PENGGULAN KENDARAAN BERMOTOR	2.850.000.000,00	2.120.043.580,00	219.199.940,00	7,69	2.339.243.520,00
31 1.16.01.1.2.16	RETRIBUSI TERMINAL	1.750.000.000,00	1.353.955.300,00	188.328.250,00	10,76	1.542.283.550,00
32 1.16.01.1.2.23	RETRIBUSI JASA ANGKUTAN (ASDP) PENYEBERANGAN	300.000.000,00	243.559.000,00	27.955.500,00	9,32	271.514.500,00
33 1.16.01.1.2.29	RETRIBUSI IZN TRAYEK	250.000.000,00	159.300.000,00	15.545.000,00	6,22	174.845.000,00
34 1.16.01.1.2.39	RETRIBUSI PEMBINAAN PERHUBUNGAN UDARA DAN TELEKOMUNIKASI	75.000.000,00	3.200.000,00	2.835.000,00	3,78	6.035.000,00
35 1.16.01.1.2.45	RETRIBUSI BECA	75.000.000,00	4.745.000,00	-	-	6.94
36 1.16.02.1.2.40	RETRIBUSI PEMBINAAN PEMANFAATAN MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI	20.000.000,00	10.973.000,00	525.000,00	2,63	11.500.000,00
37 1.17.01.1.2.02	RETRIBUSI PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN	1.803.900.000,00	849.169.500,00	115.608.000,00	6,38	964.177.500,00
38 1.17.01.1.2.05	RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN	40.850.000,00	35.500.000,00	6.200.000,00	15,18	41.700.000,00
39 1.17.01.1.2.06	RETRIBUSI PELAYANAN PENGABUAN MAYAT	55.250.000,00	12.800.000,00	300.000,00	0,54	13.100.000,00
40 1.17.01.1.2.19	RETRIBUSI PENYEDOTAN TINJA	100.000.000,00	55.193.500,00	5.823.500,00	5,82	61.017.000,00
41 1.17.02.1.2.13	RETRIBUSI SEWA LABORATORIUM	45.000.000,00	22.146.750,00	56.347.500,00	125,22	78.494.250,00
42 1.17.02.1.2.24	RETRIBUSI JASA USAHA PENGOLAHAN LIMBAH CAIR	3.300.000.000,00	500.570.075,00	37.776.194,00	1,14	538.346.269,00
43 1.17.02.1.2.25	RETRIBUSI PEMBINAAN BAGIJEN'S USAHA YANG WABA KALIAN LINGKUNGAN	2.500.000,00	4.675.000,00	1.000.000,00	40,00	5.675.000,00
44 1.18.01.1.2.03	RETRIBUSI PENGGUNAAN BIAYA CETAK KTP	1.160.146.000,00	1.190.749.052,00	138.081.900,00	11,90	1.523.830.950,00
45 1.18.01.1.2.04	RETRIBUSI PENGGUNAAN BIAYA CETAK AKTA V	589.854.000,00	198.021.350,00	18.237.850,00	3,09	216.259.200,00
46 1.18.01.1.2.38	RETRIBUSI USAHA KEPARIWISATAAN	400.000.000,00	346.945.550,00	31.563.000,00	7,89	378.508.550,00
47 1.11.07.12.13.06	RETRIBUSI ZIN SEWA GELUNG/RUANGAN / AULA	50.000.000,00	13.400.000,00	2.080.000,00	4,16	15.480.000,00
<b>JUMLAH PENERIMAAN : B</b>		51.635.251.000,00	36.175.171.886,00	3.728.879.660,00	7,22	39.304.051.346,00
1.3	C. BAGIAN LABA USAHA DAERAH					77,25
1 1.01.03.1.3.0	BAGI LABA PDAM	2.000.000.000,00	-	2.000.000.000,00	100,00	
2 1.01.03.13.02	BANK PEMBANGUNAN DAERAH	1.000.000.000,00	124.483.866,71	696.282.599,00	69,63	2.000.000.000,00
3	JUMLAH PENERIMAAN : C	1.000.000.000,00	124.483.866,71	7.696.282.599,00	889.88	2.000.000.000,00



KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	TARGET	REALISASI PENERIMAAN		SD BULAN INI	%	KET.
			SD BULAN LALU	BULAN INI			
<b>REKAPITULASI</b>							
1	1.1 A. PAJAK DAERAH	44.100.000.000,00	33.986.335.940,00	3.876.366.202,00	8,79	37.862.702.142,00	85,86
2	1.2 B. RETRIBUSI DAERAH	51.655.251.000,00	36.175.171.886,00	3.728.879.660,00	7,22	39.904.051.546,00	77,25
3	1.3 C. LABA PADAM USAHADAERAH	3.000.000.000,00	124.483.366,71	2.696.282.599,00	89,88	2.820.766.465,71	94,03
4	1.4 D PADAM YANG SAH	1.102.740.965,00	5.097.913.874,50	414.671.420,00	5,84	5.512.585.294,50	77,61
	<b>JUMLAH A + B + C + D (PAD)</b>	<b>105.857.991.965,00</b>	<b>75.383.905.567,21</b>	<b>10.716.199.881,00</b>	<b>10,12</b>	<b>86.100.105.448,21</b>	<b>81,34</b>
5	2 E. BAGI HASIL PAJAK / BUKAN PAJAK	183.52.214.300,00	125.647.244.359,90	61.632.838.496,76	33,58	187.280.082.856,66	102,03
6	F. DANA ALOKASI UMUM	351.714.000.000,00	351.714.000.000,00	-	-	351.714.000.000,00	100,00
	<b>JUMLAH PENERIMAAN (A + B + C + D + E+F)</b>	<b>641.121.206.265,00</b>	<b>552.745.149.927,11</b>	<b>72.349.038.377,76</b>	<b>11,28</b>	<b>625.094.188.304,87</b>	<b>97,50</b>

PALEMBANG, 18 JANUARI 2006

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KOTA PALEMBANG

MENGETAHUI  
WALIKOTA PALEMBANG  
EDDY SANTANA PUTRA



DINAS PENDAPATAN  
BAERAH Drs. MARWAN HASMEN, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NRP. 20008655

TEMBUSAN : KEPADA YTH

- 1 GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN
- 2 KEPALA BADAN PENGAWAIS PROVINSI SUMATERA SELATAN
- 3 ASISTEN I BIDANG PEMERINTAHAN SETDA SUMATERA SELATAN
- 4 KEPALA BIRO KEUANGAN SETDA SUMATERA SELATAN
- 5 KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
- 6 KEPALA BIRO PEMERINTAHAN UMUM SUMATERA SELATAN
- 7 INSPEKTUR KOTA PALEMBANG
- 8 KEPALA BAGIAN KEUANGAN KOTA PALEMBANG
- 9 KETUA KOMISI B DPRD KOTA PALEMBANG
- 10 KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG
- 11 KEPALA PERWAKILAN II BPK DI PALEMBANG

DAFTAR : REALISASI PENERIMAAN DAERAH KOT<sup>1</sup> LEMBANG  
 TAHUN : 2006  
 UNTUK BULAN : DESEMBER 2006

RATIO  $\frac{12}{12} \times 100 = 100\%$

NO	KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	TARGET		REALISASI - PENERIMAAN		% S/D BULAN INI	%	KET.
			SD BULAN LALU	BULAN INI	SD BULAN INI				
1	1.01.05.1.1.01.01	A. PAJAK DAERAH							
1.1	4.700.000.000,00	PAJAK HOTEL	4.021.398.109,00	514.409.138,00	10,94	4.535.807.247,30	96,51	Dipenda	
2	2.01.05.1.1.02.01	PAJAK RESTORAN	8.600.000.000,00	7.872.597.660,80	821.275.295,00	9,55	8.693.872.955,80	101,09	Dipenda
3	1.01.05.1.1.03.01	PAJAK HIBURAN	2.000.000.000,00	1.565.226.820,00	228.297.885,00	11,41	1.793.524.705,00	89,68	Dipenda
4	1.31.05.1.1.04.01	PAJAK REKLAME	3.706.000.000,00	3.212.505.158,00	415.901.976,00	11,24	3.628.407.134,00	98,07	Dipenda
5	1.01.05.1.1.05.01	PAJAK PENERANGAN JALAN	22.500.000.000,00	22.623.517.018,00	2.221.362.734,00	9,87	24.844.379.752,00	110,42	Dipenda
6	1.01.05.1.1.06.01	PAJAK PENGOLALAN BAHAN GALIAN GOL. C	600.000.000,00	281.451.457,00	226.378.575,00	31,73	597.830.032,00	84,64	Dipenda
7	1.01.05.1.1.07.01	PAJAK PARKIR	1.125.000.000,00	954.761.500,00	98.265.500,00	8,73	1.053.027.049,00	93,60	Dipenda
		JUMLAH PENERIMAAN : A	43.225.000.000,00	40.531.457.722,80	4.525.891.103,00	10,47	45.057.348.825,80	104,24	
1.2	B. RETRIBUSI DAERAH								
1	1.01.11.1.2.03.01	RETRIBUSI PENGANTIAN BIAYA KTP	1.260.146.000,00	133.265.800,00	105.354.540,00	8,26	238.652.340,00	18,94	Kecamatan
2	1.01.11.1.2.13.05	RET. SEWA GEDUNG KEC. (Sek, IT, IT II, BI, Sekretari)	55.000.000,00	38.018.380,00	-	-	58.038.380,00	69,16	Kecamatan
3	1.01.11.1.2.33.01	PUNGUTAN BL.YA. ADMINISTRASI (LEGES)	200.000.000,00	89.525.000,00	11.233.000,00	5,62	101.758.000,00	50,38	Kecamatan
4	1.02.01.1.2.15.01	RETRIBUSI JASA USAHA TEMPAT PENDARATAN KAN	150.000.000,00	133.384.984,00	17.131.590,00	11,45	150.766.574,00	100,51	Pertanian
5	1.02.01.1.2.20.01	RETRIBUSI JASA USAHA RUMAH FOTONG HE WAN (RPH)	600.000.000,00	277.120.000,00	24.285.000,00	4,05	301.495.000,00	50,23	Pertanian
6	1.02.01.1.2.40.01	RETRIBUSI USAHA KEHUTANAN	109.000.000,00	79.354.175,00	7.389.450,00	7,89	37.745.625,00	87,74	Pertanian
7	1.02.01.1.2.41.01	RET. PENGUSIAHAN & PENGELOLAAN SARANG WALET	150.000.000,00	-	-	-	-	-	Pertanian
8	1.06.01.1.2.30.01	RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)	150.000.000,00	106.315.150,00	8.300.900,00	5,53	114.516.350,00	73,41	Diperdag
9	1.06.01.1.2.31.01	RETRIBUSI IZIN USAHLA PERDAGANGAN (SUP)	420.000.000,00	236.050.000,00	16.200.000,00	4,05	252.250.000,00	63,06	Diperdag
10	1.06.01.1.2.32.01	RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI (ITD)	50.000.000,00	18.812.500,00	707.000,00	1,41	19.519.500,00	39,04	Diperdag
11	1.06.01.1.2.33.01	RETRIBUSI PENYAMPAIAN DAN ATAU PENYALURAN BAHAN MIGAS DAN NON MIGAS (PPBI. & NM)	260.000.000,00	159.612.752,00	22.621.450,00	11,31	182.234.202,00	91,12	Diperdag
12	1.08.01.1.2.28	RETRIBUSI IZIN GANGGUAN	1.870.000.000,00	1.753.094.430,00	246.364.040,00	13,17	1.953.458.470,00	106,92	PMID
13	1.09.01.1.2.41.01	RETRIBUSI PEMERINTAH DAN PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN KERJA	150.060.000,00	125.500.060,00	8.778.400,00	5,65	134.278.465,00	89,52	Diteker
14	1.09.5.1.2.42.02	RETRIBUSI PEMBINAAN PERUSAHAAN DAN KETENAGAKERJAAN	65.000.000,00	43.085.000,00	125.000,00	0,59	43.410.000,00	66,78	Distacker
15	1.10.01.1.2.38	RETRIBUSI PELAYANAN KESIHATAN	4.100.000.000,00	4.167.280.930,00	-	-	4.167.280.930,00	101,64	Dinkes
16	1.10.02.1.2.01	RETRIBUSI PELAYANAN KESIHATAN	5.945.579.277,00	5.901.265.105,00	625.992.250,00	10,53	6.527.257.355,00	109,71	PS. BAJU
17	1.11.01.1.2.13.06	RETRIBUSI IZIN SEWA GEDUNG (RUMAH GAYAULA)	50.000.000,00	24.240.000,00	22.760.000,00	45,52	47.000.000,00	94,00	Diktas
18	1.12.01.1.2.42.01	RETRIBUSI PPBT. PPUM	12.500.000,00	21.475.000,00	1.100.000,00	8,80	22.575.000,00	180,60	Ditros
19	1.12.01.1.2.42.02	RETRIBUSI PANGKAS RAMBUT DAN SALON	13.500.000,00	6.485.000,00	275.000,00	2,04	6.760.000,00	50,07	Ditros
20	1.13.01.1.2.11.01	RETRIBUSI PENGANTIAN BIAYA CETAK PETAK SITUASI	250.000.000,00	84.200.000,00	2.023.000,00	2,81	91.220.000,00	36,49	Tata Kota
21	1.13.01.1.2.26.01	RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)	22.500.000.000,00	11.370.940.950,00	1.154.449.800,00	5,13	12.525.390.750,00	53,67	Tata Kota
22	1.13.01.1.2.26.01	RETRIBUSI IZIN PENGGUNAN TANAH (IPT)	225.000.000,00	232.942.800,00	20.494.000,00	9,11	233.436.800,00	112,64	Tata Kota
23	1.13.01.1.2.37.01	RET. PEMBINAAN DAN PENTELENG GARAJAN REKLAME	1.500.000.000,00	1.183.323.637,00	215.673.825,00	14,38	1.398.997.462,00	93,27	Tata Kota

NO REKENING	JENIS PENERIMAAN	TARGET	REALISASI - PENERIMAN		SD BULANINI	%	KET.	
			SD BULAN LALU	BULANINI				
24 1.14.01.1.2.10.01	RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PBK	300.000.000,00	215.299.589,00	30.494.285,00	10,16	245.793.874,00	81,93	PBK
25 1.15.01.1.2.13.09	RETRIBUSI SEWA LABORATORIUM	125.000.000,00	93.550.000,00	31.500.000,00	25,20	125.050.000,00	100,04	PU
26 1.15.01.1.2.13.19	RET. PEMB. & RET. PENGENDA. PEMANFAATAN RAWA	200.000.000,00	122.332.400,00	2.535.732,00	-1,27	124.872.100,00	62,44	PU
27 1.15.01.1.2.31.01	RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IJUK)	200.065.000,00	163.198.000,00	4.132.000,00	2,07	172.330.000,00	86,17	PU
28 1.15.01.1.2.34.01	RET. IZN GALIAN PAM, TELKOM, GAS, LISTRIK, & GO-C	100.000.000,00	15.050.000,00	1.115.000,00	1,12	16.145.000,00	16,15	PU
29 1.16.01.1.2.07.01	RETRIBUSI PANTIR DI TEP JALAN UMUM	5.035.900.000,00	2.227.997.400,00	309.999.500,00	4,15	2.437.097.200,00	48,39	Dishub
30 1.16.01.1.2.09.01	RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOtor	3.500.000.000,00	2.253.816.780,00	246.105.350,00	6,84	2.479.920.160,00	68,89	Dishub
31 1.16.01.1.2.16.01	RETRIBUSI TERMINAL	2.000.000.000,00	1.258.698.450,00	147.145.750,00	7,55	1.405.754.200,00	70,29	Dishub
32 1.16.01.1.2.23.01	RETRIBUSI JASA ANGGUTAN LAUT, (JASA) SUNGAI & PENYEGERANGAN (ASDP)	1.000.000.000,00	562.842.300,00	42.658.500,00	4,27	605.500.800,00	60,55	Dishub
33 1.16.01.1.2.29.01	RETRIBUSI IZIN TRAYEK	1.350.000.000,00	1.232.385.000,00	134.195.000,00	13,42	1.365.280.000,00	136,66	Diket Dishub
34 1.16.01.1.2.39.01	RETRIBUSI PEMBINAAN PERHUBUNGAN UDARA DAN TELEKOMUNIKASI	400.000.000,00	384.514.500,00	37.720.200,00	9,43	422.234.800,00	105,56	Dishub
35 1.16.01.1.2.45.01	RETRIBUSI BECA	30.000.000,00	1.170.000,00	-	-	1.170.300,00	3,90	Dishub
36 1.16.02.1.2.40.01	RETRIBUSI PEMBINAAN PEMANFAATAN MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI	50.600.000,00	10.550.000,00	\$25.000,00	1,62	11.175.000,00	22,35	Inforcom
37 1.17.01.1.2.02	RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMAHAAN KEBERSHAN	2.900.000.000,00	93.572.000,00	\$3.255.000,00	4,91	1.003.827.000,00	59,19	DKK
38 1.17.01.1.2.05	RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAHAN	60.600.000,00	56.550.000,00	5.650.000,00	11,03	73.200.000,00	122,00	DKK
39 1.17.01.1.2.06	RETRIBUSI PELAYANAN PENGABUAN MAYAT	75.000.000,00	21.120.000,00	2.500.000,00	2,57	23.400.300,00	31,20	DKK
40 1.17.01.1.2.19	RETRIBUSI JASA USAHA PENYEDOTAN TINJA	125.000.000,00	52.141.500,00	4.543.000,00	3,63	\$6.684.500,00	45,35	DKK
41 1.17.02.1.2.13.01	INDUSTRI RET.JASA LABORATORIUM (ANALISA LIN.BAH CAIR)	45.000.000,00	23.158.030,00	7.439.000,00	16,53	30.507.000,00	68,02	Bapedda
42 1.17.02.1.2.24.01	- RETRIBUSI IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR	3.500.000.000,00	3.734.026,53	34.449.014,90	0,93	3.511.730.000,00	15,77	Bapedda
43 1.17.02.1.2.24.02	- RETRIBUSI JENIS USAHA DAN ATAU KEGIATAN YANG WAJIB KAJIAN LINGKUNG.N	50.000.000,00	2.650.000,00	2.25.000,00	0,45	2.875.000,00	5,75	Bapedda
44 1.18.01.1.2.04.01	RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK AKTA CAIL	349.247.200,00	174.934.200,00	16.565.900,00	4,85	191.050.100,00	54,70	Cepil
45 1.20.01.1.2.38.01	RETRIBUSI PEMBINAAN USAHA KEPARIWISATAAN	600.000.000,00	233.310.300,00	27.439.000,00	3,24	325.739.300,00	40,72	Periwisata
<b>JUMLAH PENERIMAAN : B</b>		61.041.972.577,00	36.773.322.498,50	3.602.591.774,00	5,90	40.375.914.272,50	66,14	
1.3	C. HASIL PISIH MILIK DAERAH & HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAH							
1 1.01.03.1.3.02	BAGIAN LABA LEMBAGA KEUANGAN BANK :					821.389.463,07	82,14	
2 1.01.03.1.3.02.01	BANK PEMBANGUNAN DAERAH	1.000.000.000,00				821.389.463,07	82,14	
3	JUMLAH PENERIMAAN : C	1.000.000.000,00				821.389.463,07	82,14	

KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	TARGET	REALISASI - PENERIMAAN			%	SD BULAN INI	%	KET.
			SD BULAN LALU	BULAN INI	%				
1.4	D. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SYAH HA-SU PENTUALAN ASET DAERAH YANG DIPISAHKAN	150.000.000,00	115.117.160,00	28.324.000,00	18,88	143.441.160,00	95,63		
1. 1.01.03.1.4.01.01	PENERIMAAN JASA GIRO	1.450.000.000,00	1.185.238.593,00	35.744.134,00	2,47	1.220.983.127,00	84,21		
2. 1.01.03.1.4.02.01	PENERIMAAN BUNGA DEPOSITO (BPDS)	6.005.855.777,00	8.623.958.310,06	918.333.320,00	15,29	9.542.291.630,00	158,88		
3. 1.01.03.1.4.05.01	PENERIMAAN GANTI RUGI ATAS KEKAYAAN DAERAH (TP/TR)	75.000.000,00	38.482.500,00	3.000.000,00	4,00	41.482.500,00	55,31		
4. 1.01.03.1.4.06.01	JUMLAH PENERIMAAN : D	7.680.855.777,00	9.962.796.963,00	985.401.454,00	12,83	10.948.198.417,00	142,54		
	JUMLAH PENERIMAAN RUTIN (A + B + C + D) / PAD	112.947.828.304,00	87.267.577.184,30	9.935.273.794,07	8,80	97.202.850.978,37	86,06		
1.5	E. BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK BAGI HASIL PAJAK :								
1. 1.01.03.2.1.01.03	PAJAK PENGHASIL. ORG. PRIB. TERMASUK PPH PS. 21	26.320.955.949,06	15.792.573.570,00	12.298.417.803,00	46,72	28.090.991.373,00	106,72		
2. 1.01.03.2.4.01.01	PAJAK KENDARAAN BERMOBIL (PKB)	30.200.000.000,00	11.764.778.566,83	6.518.206.314,00	21,58	18.282.984.830,83	60,54		
3. 1.01.03.2.4.01.02	PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR	40.300.000,00	13.577.404,00	23.573.865,00	58,95	37.156.269,00	92,89		
4. 1.01.03.2.4.01.03	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	29.920.069.060,00	11.216.034.184,50	5.776.161.953,00	19,31	16.992.196.137,50	56,79		
5. 1.01.03.2.4.01.05	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERNITR. (P3BNKB)	10.554.000.060,50	9.954.659.452,49	6.803.438.323,00	64,25	16.758.097.785,49	158,33		
6. 1.01.03.2.4.01.06	PAJAK PENGAYBULAN AIR PERMUKAAN & ABU	1.529.500.300,90	1.16.318.169,34	58.841.586,00	3,85	175.161.755,34	11,45		
7. 1.01.05.2.1.01.01	PAJAK BUMIDAN BANGUNAN (PBB)	44.620.968.960,00	28.490.410.197,00	10.297.029.740,00	23,08	38.787.439.937,00	86,93		
8. 1.01.05.2.1.01.02	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	14.500.600.000,00	12.974.154.327,00	2.277.133.252,00	15,70	15.251.587.579,00	105,18		
9. 1.01.05.2.1.01.03	PENERIMAAN BIAYA PEMERINTAHAN P5R	2.595.621.192,30	2.114.057.027,00	568.711.301,00	24,81	2.782.768.328,00	103,23		
10. 1.01.05.2.1.01.04	PENERIMAAN INSENTEIF PBB DAN BPHTB	2.328.816.041,04							
11. 1.01.05.2.1.01.05	PEN. BPHTB BAGIAN PEMERINTAH PUSAT	2.405.512.528,00	1.202.756.264,00	23.347.626,00	0,97	1.226.103.890,00	50,97		
	JUMLAH BAGI HASIL PAJAK	165.145.521.770,00	93.639.619.172,16	44.744.868.763,00	27,09	138.384.487.935,16	83,80		
	BAGI HASIL BUKAN PAJAK/SDA :								
1. 1.01.03.2.1.02.01	PROVISI SUMBER DAYA HUTAN (PSDH)	239.829.506,60		72.578.307,00	31,57	72.578.307,00	31,57		
2. 1.01.03.2.1.02.03	IURAN TETAP (LANDRENT)	150.000.000,00							
3. 1.01.03.2.1.02.06	PERIKANAN	1.272.727.275,50	135.124.028,00	42.850.181,00	3,37	182.074.209,00	14,31		
4. 1.01.03.2.1.02.05	PERTAMBANGAN MENYAK BUNI	20.000.000.000,00	27.147.915.562,00	8.394.516.126,00	41,97	35.542.431.688,00	177,71		
5. 1.01.03.2.1.02.09	PERTAMBANGAN GAS ALAM	22.072.000.000,00	23.163.760.027,00	7.242.570.571,00	32,81	39.406.330.598,00	137,76		
6. 1.01.03.2.1.02.10	PERAMBANGAN UMMU	2.402.470.150,00	1.165.395.389,00	428.781.506,00	17,85	1.594.177.095,00	66,36		
	JUMLAH BAGI HASIL BUKAN PAJAK	46.127.096.920,00	51.616.295.206,00	16.181.296.691,00	35,08	67.797.591.897,00	146,98		
	JUMLAH PENERIMAAN : E :	211.272.618.690,00	145.255.914.378,16	60.926.165.454,00	28,84	206.182.079.832,16	97,59		
1.6	F. DANA alokasi sumur (DAU)	551.149.000.000,00	551.149.000.000,00	-	-	551.149.000.000,00	100,00		
	G. JUMLAH PENERIMAAN F	551.149.000.000,00	551.149.000.000,00	-	-	551.149.000.000,00	100,00		
1.7	H. DANA alokasi khusus :								
	- DANA alokasi khusus	940.000.000,00	2.034.000.000,00	7.906.000.000,00	79,54	9.940.000.000,00	100,00		
	- DANA alokasi khusus	23.284.600,00	-	-	-	-	-	-	
	J. JUMLAH PENERIMAAN G	9.963.284.600,00	2.034.000.000,00	7.906.000.000,00	79,54	9.940.000.000,00	100,00		

KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	TARGET	REALISASI - P. PERIMAAAN	S/D BULAN LALU	BULAN INI	%	S/D BULAN INI	%	KET.
L8	H. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SYAH								
1	1.01.03.3	BANTUAN DANA DARI PEMERINTAH KE-3							
1.01.03.3.1.03.01	BANTUAN DARI BANK SUMSEL	700.000.000,-							
1.01.03.3.1.03.02	KONTRIBUSI PASAR KEPANDEAN	2.000.000.000,-		2.000.000.000,-					
1.01.03.3.1.03.03	KONTRIBUSI BASEMENT PASAR 16 IJIR	750.000.000,-		200.900.000,-			2.000.000.000,-	100,00	
1.01.03.3.1.03.04	KONTRIBUSI PIDAM TIRTIA MUSI PALEMBANG	1.000.000.000,-		-			200.000.000,-	26,67	
1.01.03.3.1.04.01	PENERIMAAN LAIN - LAIN	7.700.000.000,-		4.570.261.312,00	1.000.000.000,-	1.000.000.000,-	1.000.000.000,-	100,00	
1.01.03.3.1.05.01	PENERIMAAN BAGI HASIL PIK PROVINSI TAHUN 2005	21.074.107.400,00		659.423.354,00	8,69	5.239.684.676,00	68,65		
	JUMLAH PENERIMAAN H	33.224.107.400,00		21.074.107.400,00		21.074.107.400,00	100,00		
	REKAPITULASI			27.844.368.712,00	1.669.423.364,00	5,02	29.513.792.076,00	88,83	
1	1.1	A. PAJAK DAERAH		43.225.000.000,-	40.531.457.722,80	4.525.891.103,00	10,47	45.057.348.825,80	104,24
2	1.2	B. RETRIBUSI DAERAH		61.041.972.527,00	36.773.322.498,50	3.692.591.774,00	5,90	40.375.914.272,50	66,14
3	1.3	C. HASIL PERUSAHAAN MILIK DAERAH DAN BERSAMA PENGELOLAHAN KEKAYAAN DAERAH YG LEBIH SAKAN		1.000.000.000,-	-	821.339.453,07	82,14	821.339.463,07	82,14
4	1.4	D. LAIN-LAIN PAD YANG SYAH		7.580.855.777,06	9.962.796.963,00	985.401.454,00	12,33	10.948.193.417,00	142,54
5	1.5	JUMLAH (PAD) +E+F+G+H	112.947.828.304,00	87.267.577.184,30	9.935.273.794,07	8,80	97.202.850.978,37	86,06	
6	1.6	E. BAGI HASIL PAJAK / BURAN SAJAK	21.127.618.696,00	145.255.914.378,16	60.926.155.454,00	28,84	206.182.079.832,16	97,59	
7	1.7	F. DANA ALOKASI UMUM	551.149.050.000,-	551.149.050.000,-	-		551.149.050.000,-	100,00	
8	1.8	G. DANA ALOKASI KEGIATAN	2.963.234.630,00	2.031.000.000,-	7.905.005.000,-	79,35	9.910.000.000,-	99,77	
	H. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SYAH	—	—	27.341.358.712,00	1.669.423.364,00	3,02	29.515.792.076,00	88,83	
	JUMLAH (PAD) +E+F+G+H	218.556.839.944,00	813.550.866.274,46	89.436.862.612,07	8,73	892.987.722.886,53	97,33		



TERBUAT : KEPADA YTH :

1. GUBERNIR PROVINSI SUMATERA SELATAN
2. KEPALA BADAN PENGAWAS PROPRIETI SUMATERA SELATAN
3. ASISTEN I BIDANG PEMERINTAHAN SETDA SUMETERA SELATAN
4. KEPALA BIRO KELUARGA PEMERINTAHAN SETDA SUMETERA SELATAN
5. KEPALA BIRO PEMERINTAHAN UNTUK SUMATERA SELATAN
6. KEPALA PERWAKILAN UBPK RI PALEMBANG
7. KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH SUMUTRA SELATAN
8. KETUA KOMESI II DPRD KOTA PALEMBANG
9. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG
10. KEPALA BAGIAN KEUANGAN KOTA PALEMBANG
11. INSPEKTUR KOTA PALEMBANG

**DAFTAR : REALISASI PENERIMAAN DAERAH KOTA PALEMBANG**  
**TAHUN : 2007**  
**UNTUK BULAN : DESEMBER 2007**

RATIO :  $12/12 \times 100 = 100\%$

NO.	KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	TARGET	REALISASI - PENERIMAAN		% S/D BULAN LALU	S/D BULAN INI	%	KET.
				S/D BULAN LALU	BULAN INI				
<b>I. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>									
1	1.20.05.00.004.1.1.01	PAJAK HOTEL	5.400.000.000,00	4.311.364.123,00	642.937.851,00	11,91	4.954.301.974,00	91,75	Dipenda
2	1.20.05.00.004.1.1.02	PAJAK RESTORAN	9.700.000.000,00	9.849.583.904,00	913.176.570,00	9,41	10.762.760.474,00	110,96	Dipenda
3	1.20.05.00.004.1.1.03	PAJAK HIBURAN	2.400.000.000,20	2.419.876.787,00	205.120.310,00	8,55	2.624.997.097,00	109,37	Dipenda
4	1.20.05.00.004.1.1.04	PAJAK REKLAME	4.050.000.000,00	3.563.461.075,73	557.582.551,00	13,77	4.121.043.626,73	101,75	Dipenda
5	1.20.05.00.004.1.1.05	PAJAK PENERANGAN JALAN	28.000.000.000,09	24.530.135.557,33	2.366.591.796,00	8,45	26.896.727.353,33	96,06	Dipenda
6	1.20.05.00.004.1.1.06	PAJAK PENGOLOHAN BAHAN GALLAN GOL. C	600.000.000,00	474.406.267,00	258.297.865,00	43,05	732.704.132,00	122,12	Dipenda
7	1.20.05.00.004.1.1.07	PAJAK PARKIR	1.325.000.000,00	1.283.218.448,00	111.114.510,00	8,39	1.394.332.950,00	105,23	Dipenda
		<b>JUMLAH PENERIMAAN I.1 :</b>	<b>51.475.000.000,00</b>	<b>46.432.046.154,06</b>	<b>5.054.821.453,00</b>	<b>9,82</b>	<b>51.485.867.607,06</b>	<b>100,02</b>	
<b>I.2 RETRIBUSI DAERAH</b>									
1	1.01.01.00.00.4.1.2.02.01	RET. PEMAKAIAN REKAYAAN DAERAH (GED/AULA)	160.000.000,00	110.960.000,00	3.000.000,00	1,88	113.960.000,00	71,23	Diknas
2	1.02.01.00.00.4.1.2.01.01	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN	4.007.686.272,00	3.591.196.382,00	396.390.137,00	9,89	3.987.586.519,00	99,50	Kesehatan
3	1.02.01.00.00.4.1.2.03.09	RETRIBUSI IZN PRAKTEK KESЕHATAN	65.150.000,00	69.750.000,00	5.750.000,00	8,83	75.500.000,00	115,89	Kesehatan
4	1.02.01.00.00.4.1.2.03.10	RETRIBUSI IZN LAIK SEHAT	44.200.000,00	68.280.000,70	-	-	68.280.000,00	154,48	Kesehatan
5	1.03.02.00.00.4.1.2.01.01	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RSUD BARU	6.823.523.800,00	6.016.261.525,00	1.141.171.000,00	16,72	7.157.432.525,00	104,89	RSUD BARU
6	1.03.01.00.00.4.1.2.02.14	RETRIBUSI SEWA LABORATORIUM	150.000.000,00	177.750.000,00	27.250.000,00	18,17	150.000.000,00	100,00	PU
7	1.03.01.00.00.4.1.2.03.06	RETRIBUSI IZN USAHA JASA KONSTRUKSI (IJUK)	175.000.000,00	170.889.000,00	4.450.000,00	2,54	175.339.000,00	100,19	PU
8	1.03.01.00.00.4.1.2.03.07	RETRIBUSI IZN PENITMBUNAN RAWA	250.000.000,00	63.093.000,00	68.594.000,00	27,44	131.687.000,00	52,67	PU
9	1.03.06.00.00.4.1.2.03.11	RET. IZN GALIAN (PAM, LISTRIK, TELKOM, PIPA GAS)	100.000.000,00	-	-	-	-	-	Penerangan
10	1.04.02.00.00.4.1.2.01.08	RET. PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN	325.000.000,00	308.505.290,90	17.505.500,00	5,39	326.010.790,00	100,31	PK
11	1.05.01.00.00.4.1.2.01.09	RETRIBUSI PENGANTIAN BIAYA CETAK PETA	200.000.000,00	97.855.000,00	4.755.000,00	2,38	102.610.000,00	51,31	Tata Kota

NO.	KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	TARGET	REAL SASI - PENERIMAAN		% S/D BULAN INI	%	KET.
				S/D BULAN ALU	BULAN INI			
12	1.05.01.00.00.4.1.2.03.01	RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN	18.000.000,00	14.769.29	650.00	1.195.614.000,00	6,64	1.5.964.905.637,00
13	1.05.01.00.00.4.1.2.03.16	RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGELUARAN TANAH	250.000.000,00	115.47	600,00	-	-	115.471.600,00
14	1.05.01.00.00.4.1.2.03.19	RETRIBUSI PEMBINAAN & PENYELINGGARAN REKLAME	2.750.000.000,00	2.337.15	529,00	165.444.900,00	6,02	2.502.604.429,00
15	1.07.01.00.00.4.1.2.01.05	RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN LIMUM	3.250.000.000,00	1.709.70	730,00	142.366.310,00	5,38	1.852.068.000,00
16	1.07.01.00.00.4.1.2.01.07	RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BER MOTOR	2.750.300.000,00	2.533.22	222,00	218.517.245,00	7,95	2.751.745.260,00
17	1.07.01.00.00.4.1.2.02.04	RETRIBUSI TERMINAL	2.000.000.000,00	1.093.84	850,00	120.850.500,00	6,04	1.214.690.850,00
18	1.07.01.00.00.4.1.2.02.09	RETRIBUSI PEMBINAAN P. UDARA DAN POSTEL	450.000.000,00	340.84	4.000,00	33.524.000,00	7,45	374.368.000,00
19	1.07.01.00.00.4.1.2.02.11	RETRIBUSI JASA ANGKUTAN SUNGAI & PENYEBERANGAN (ASDP)	800.000.000,00	589.343.54	1,00	46.074.500,00	5,76	635.418.044,00
20	1.07.01.00.00.4.1.2.03.04	RETRIBUSI IZIN TRAYEK	1.400.000.000,00	1.397.090.000,00	122.165.000,00	8,73	1.519.275.000,00	108,52
21	1.08.02.00.00.4.1.2.02.12	RETRIBUSI PENGELOLAAN LIMBAH CAIR	587.157.455,00	435.537	254,00	77.777.716,00	13,25	513.314.970,00
22	1.08.02.00.00.4.1.2.02.14	RETRIBUSI JASA LABORATORIUM	33.848.000,00	88.638.000,00	8.637.000,00	25,52	97.275.000,00	287,39
23	1.08.02.00.00.4.1.2.03.08	RET. KEGIATAN YG WJB DILENGKAPI KAJIAN LINGKUNGAN	4.825.000,00	2.200.000,00	-	-	2.200.000,00	45,60
24	1.08.04.00.00.4.1.2.01.02	RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN	3.000.000.000,00	1.722.430.000,00	203.590.000,00	6,79	1.926.020.000,00	64,20
25	1.08.04.00.00.4.1.2.01.04	RET. PELAYANAN PEMAKAMAN & PENGABUAN MAYAT	225.000.000,00	112.050.000,00	5.550.000,00	2,47	117.600.000,00	52,27
26	1.08.04.00.00.4.1.2.02.07	RET. PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS	200.000.000,00	45.405.500,00	12.850.000,00	6,43	58.255.500,00	29,13
27	1.10.01.00.00.4.1.2.01.03	RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA KTP DAN AKTE CATATAN SIPIL	279.247.250,00	237.730.100,00	19.054.100,00	6,84	276.824.200,00	99,13
28	1.13.01.00.00.4.1.2.02.10	RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA	62.000.000,00	24.550.000,00	2.375.000,00	3,83	26.925.000,00	43,43
29	1.13.01.00.00.4.1.2.02.15	RETRIBUSI PANGKAS RAMBUT DAN SALON	12.00.000,00	12.760.300,00	-	-	12.760.000,00	106,33
30	1.14.01.00.00.4.1.2.01.20	RET. PEMBINAAN & PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN KERJA	250.000.000,00	181.303.585,00	1.055.500,00	0,42	182.363.485,00	72,95
31	1.14.01.00.00.4.1.2.01.21	RET. PEMBINAAN PERUSAHAAN & KETENAGAKERJAAN	75.00.000,00	31.780.000,00	345.000,00	0,43	32.105.000,00	42,81
32	1.16.01.00.00.4.1.2.03.03	RETRIBUSI IZIN GANGGUAN/KERAMALAN	2.150.000.000,00	2.347.04	1.573,00	99.615.500,00	4,44	2.446.877.073,00
33	1.20.11.00.00.4.1.2.01.03	RET. PENGGANTIAN BY KTP & KK	146.399.100,00	223.339.700,00	14.190.200,00	9,69	237.529.900,00	162,25
34	1.20.11.00.00.4.1.2.01.11	RETRIBUSI JASA UMUM LAINNYA (LEGES)	17.850.000,00	13.850.300,00	550.000,00	3,08	14.400.000,00	80,67
35	1.20.12.00.00.4.1.2.01.03	RET. PENGGANTIAN BY KTP & KK	64.324.800,00	39.427.250,00	58.060.250,00	90,26	97.487.500,00	151,56
36	1.20.12.00.00.4.1.2.01.11	RETRIBUSI JASA UMUM LAINNYA (LEGES)	6.000.000,00	3.810.000,00	-	-	3.810.000,00	63,50

NO.	KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	TARGET	REALISASI - PENERIMAAN		% S/D BULAN INI	% KET.
				S/D BULAN LALU	BULAN INI		
37	1.20.13.00.00.4.1.2.01.03	RET. PENGGANTIAN BY KTP & KK	70.800.000,00	92.790.650,00	6.878.100,00	9,71	95.568.750,00 140,78 SU I
38	1.20.13.00.00.4.1.2.01.11	RETRIBUSI JASA UJUM LAINYA (LEGES)	12.800.000,00	7.510.600,00	250.000,00	1,81	7.860.000,00 56,96 SU I
39	1.20.14.00.00.4.1.2.01.03	RET. PENGGANTIAN BY KTP & KK	33.500.000,00	19.225.300,00	28.458.450,00	84,95	46.684.750,00 139,36 Kartapati
40	1.20.14.00.00.4.1.2.01.11	RETRIBUSI JASA UJUM LAINYA (LEGES)	15.500.000,00	4.137.000,00	200.000,00	1,21	4.337.000,00 26,28 Kartapati
41	1.20.15.00.00.4.1.2.01.05	RET. PENGGANTIAN BY KTP & KK	40.250.000,00	29.447.450,00	7.743.100,00	19,23	37.196.550,00 92,36 Gandus
42	1.20.15.00.00.4.1.2.01.11	RETRIBUSI JASA UJUM LAINYA (LEGES)	9.250.000,00	8.046.000,00	-	-	8.046.000,00 86,98 Gandus
43	1.20.16.00.00.4.1.2.01.03	RET. PENGGANTIAN BY KTP & KK	55.000.000,00	72.128.300,00	-	-	72.128.300,00 110,97 III Barat
44	1.20.16.00.00.4.1.2.01.11	RETRIBUSI JASA UJUM LAINYA (LEGES)	20.000.000,00	4.135.000,00	50.000,00	0,50	4.185.000,00 41,85 III Barat
45	1.20.17.00.00.4.1.2.01.03	RET. PENGGANTIAN BY KTP & KK	135.050.500,00	130.061.400,00	-	-	130.061.400,00 96,31 III Barat
46	1.20.17.00.00.4.1.2.01.11	RETRIBUSI JASA UJUM LAINYA (LEGES)	12.000.000,00	11.389.000,00	-	-	11.389.000,00 94,91 III Barat
47	1.20.18.00.00.4.1.2.01.03	RET. PENGGANTIAN BY KTP & KK	52.102.450,00	76.498.850,00	-	-	76.498.850,00 93,17 Plaju
48	1.20.18.00.00.4.1.2.01.11	RETRIBUSI JASA UJUM LAINYA (LEGES)	8.713.000,00	5.667.000,00	-	-	5.667.000,00 65,04 Plaju
49	1.20.19.00.00.4.1.2.01.03	RET. PENGGANTIAN BY KTP & KK	51.560.000,00	63.055.150,00	4.003.000,00	6,50	67.058.150,00 108,93 IT I
50	1.20.19.00.00.4.1.2.01.11	RETRIBUSI JASA UJUM LAINYA (LEGES)	9.500.000,00	4.745.000,00	200.000,00	2,11	4.945.000,00 52,05 IT I
51	1.20.20.00.00.4.1.2.01.03	RET. PENGGANTIAN BY KTP & KK	115.361.000,00	125.693.000,00	7.119.550,00	6,12	132.812.550,00 114,14 Kalidoni
52	1.20.20.00.00.4.1.2.01.11	RETRIBUSI JASA UJUM LAINYA (LEGES)	9.975.000,00	6.300.000,00	850.000,00	8,52	7.150.000,00 71,68 Kalidoni
53	1.20.21.00.00.4.1.2.02.01	RETRIBUSI JASA USAHA	3.000.000,00	1.900.000,00	700.000,00	8,75	2.600.000,00 32,50 Kalidoni
54	1.20.21.00.00.4.1.2.01.03	RET. PENGGANTIAN BY KTP & KK	58.800.000,00	43.790.550,00	15.276.800,00	25,98	59.067.350,00 100,45 Bukit Kec
55	1.20.21.00.00.4.1.2.01.11	RETRIBUSI JASA UJUM LAINYA (LEGES)	2.250.000,00	3.220.000,00	15.000,00	0,67	3.235.000,00 143,78 Bukit Kec
56	1.20.22.00.00.4.1.2.01.03	RET. PENGGANTIAN BY KTP & KK	52.397.700,00	219.939.350,00	21.433.550,00	34,35	241.372.900,00 386,83 Sulakrami
57	1.20.22.00.00.4.1.2.01.11	RETRIBUSI JASA UJUM LAINYA (LEGES)	13.500.000,00	15.000.000,00	2.875.000,00	15,54	17.875.000,00 96,62 Sulakrami
58	1.20.23.00.00.4.1.2.01.03	RET. PENGGANTIAN BY KTP & KK	7.198.400,00	57.566.150,00	54.521.000,00	74,48	112.087.150,10 153,13 Kemuning
59	1.20.23.00.00.4.1.2.01.11	RETRIBUSI JASA UJUM LAINYA (LEGES)	10.000.000,00	6.225.000,00	200.000,00	2,00	6.425.000,00 64,25 Kemuning
60	1.20.24.00.00.4.1.2.01.03	RET. PENGGANTIAN BY KTP & KK	133.889.500,00	96.794.000,00	8.179.200,00	5,31	104.973.200,00 68,21 Soko
61	1.20.24.00.00.4.1.2.01.11	RETRIBUSI JASA UJUM LAINYA (LEGES)	12.280.000,00	9.560.000,00	590.000,00	4,80	10.150.000,00 82,65 Soko
62	1.20.24.00.00.4.1.2.02.01	RETRIBUSI JASA USAHA (RETRIBUSI GEDUNG)	20.000.000,00	10.000.000,00	50,00	20.000.000,00 100,00 Soko	

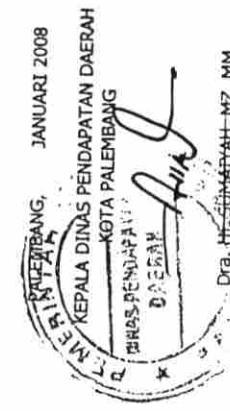
NO.	KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	TARGET	REALISASI - PENERIMAAN		% S/D BULAN LALU	% S/D BULAN TUTU	%	KET.
				S/D BULAN LALU	BULAN TUTU				
3	2.01.01.00.00.4.1.2.02.03	RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN	≤ 25.725.000,00	125.557.876,00	31.081.362,00	19,52	157.039.236,00	99,53	Pertanian
4	2.01.01.00.00.4.1.2.02.08	RETRIBUSI RUMAH POTONG HIWAN	429.565.000,00	230.055.000,00	19.480.000,00	4,76	279.565.000,00	68,26	Pertanian
5	2.01.01.00.00.4.1.2.02.15	RETRIBUSI USAHA KEHUTANAN	95.635.000,00	38.100.050,00	-	-	38.100.050,00	38,16	Pertanian
6	2.01.01.00.00.4.1.2.02.16	RETRIBUSI JASA-JASA BURUNG WALET	345.125.000,00	161.355.600,00	6.848.000,00	1,98	168.203.600,00	48,03	Pertanian
7	2.04.01.00.00.4.1.2.01.05	RETRIBUSI PEMBINA USAHA KEPARIWISATAAN	552.150.000,00	470.168.125,00	38.380.000,00	5,95	506.548.155,00	92,10	Pariwisata
8	2.06.01.00.00.4.1.2.05.18	RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI	50.000.000,00	40.468.000,00	750.000,00	1,50	41.218.000,00	82,44	Perindagkop
9	2.06.01.00.00.4.1.2.03.19	RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN	1.097.300.000,00	330.750.000,00	21.100.000,00	1,92	351.850.000,00	32,07	Perindagkop
10	2.06.01.00.00.4.1.2.03.20	RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN	506.950.000,00	342.427.500,00	27.699.000,00	3,43	370.126.500,00	45,87	Perindagkop
11	2.06.01.00.00.4.1.2.03.21	RETRIBUSI PENYIMPANAN & ATAU PENYALFEDAN MIGAS DAN NON MIGAS	200.000.000,00	99.341.500,00	-	-	99.341.500,00	49,67	Perindagkop
		JUMLAH PENERIMAAN 1.2 :	55.999.049.227,00	44.039.947.163,00	4.532.211.055,00	8,09	48.572.158.219,00	86,74	
		1.3 HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN							
13.1	1.20.03.00.00.4.1.3.01 :	BAGIAN LABA ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH / BUMD :							
1	1.20.03.00.00.4.1.3.01.01	BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMSEL	1.250.000.000,00	-	1.366.825.719,28	109,35	1.366.826.719,28	109,35	
2	1.20.03.00.00.4.1.3.01.02	PDAM TIRTA MUSI	1.000.000.000,00	-	1.000.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00	100,00	
3	1.20.03.00.00.4.1.3.01.03	PD. PASAR PALEMBANG JAYA	500.000.000,00	-	-	-	-	-	
		JUMLAH PENERIMAAN 1.3 :	2.750.000.000,00	-	2.366.826.719,28	86,07	2.366.826.719,28	86,07	
		1.4 LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG STAH							
1	1.20.03.00.00.4.1.4.01	HASIL PENJUALAN ASET DAERAH YANG TIDAK DIPISAHKAN :							
1	1.20.03.00.00.4.1.4.01.19	PENJUALAN ASET DAERAH LAINNYA	765.186.465,20	136.522.900,00	46.550.000,00	5,93	102.072.900,00	23,32	
2	1.20.03.00.00.4.1.4.02.02	PENERIMAAN JASA GIRO :							
2	1.20.03.00.00.4.1.4.02.01	JASA GIRO KAS DAERAH	8.000.000.000,00	7.689.115.619,92	202.811.434,00	2,54	7.891.977.053,92	98,65	

NO.	KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	TARGET	REALISASI - PENERIMAAN		% S/D BULAN INI	%	KET.
				S/D BULAN LALU	BULAN INI			
3	1.20.03.00.4.1.4.03	PENERIMAAN BUNGA DEPOSITO :						
	1.20.03.00.4.1.4.03.01	PEN. REK. DEPOSITO PD BANK PEMBANGUNAN DAERAH	3.200.000.000,00	1.935.555.050,00	157.082.330,00	4,91	2.092.708.380,00	65,40
4	1.20.03.00.4.1.4.04	TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH (TGR) :						
	1.20.03.00.4.1.4.04.01	KERUGIAN UANG DAERAH	75.000.000,00	22.372.795,00	3.375.835,00	5,17	37.843.630,00	50,46
5	1.20.03.00.4.1.4.10	PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN PPn 21	1.764.849.000,00	-	382.725.000,00	21,69	382.725.000,00	21,69
6	1.20.03.00.4.1.4.14	PENERIMAAN LAIN-LAIN :						
	1.20.03.00.4.1.4.14.03	PENERIMAAN LAIN-LAIN	7.500.000.000,00	22.438.084.767,21	6.676.100.029,00	89,01	29.114.184.796,21	388,19
		JUMLAH PENERIMAAN L4 :	21.325.035.465,20	32.233.321.132,13	7.469.145.628,00	35,03	39.702.466.760,13	186,18
1		JUMLAH PENERIMAAN PAD :	131.549.084.692,20	122.705.314.449,19	19.423.004.855,28	14,76	142.128.319.304,47	108,04
		II						
	1.20.03.00.004.2.1	II.1 BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK						
		II.1.1 :						
1	1.20.05.00.4.2.1.01.01	BAGI HASIL DARI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (BPHTB)	41.192.064.000,00	47.245.177.483,00	5.558.359.727,00	13,49	52.803.537.210,00	128,19
2	1.20.05.00.4.2.1.01.02	BAGI HASIL DARI BEA PEROLEHAN HAK ATAS BUMI DAN BANGUNAN (BPHTB)	13.952.000.000,00	15.620.590.608,00	807.855.293,00	5,79	16.428.545.901,00	117,75
3	1.20.03.00.4.2.1.01.03	BAGI HASIL DARI PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI (TERMASI DPN PASAL 21, 25, DAN 29)	34.479.415.795,00	20.687.649.477,00	16.219.239.281,00	47,04	36.906.888.758,00	107,04
4	1.20.03.00.4.2.1.01.04	BAGI HASIL PBB BAG. PEMERINTAH PUSAT YANG DIKEMBALIKAN KE KABUPATEN / KOTA	3.148.875.073,00	-	6.086.508.737,00	193,29	6.086.508.737,00	193,29

NO.	KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	TARGET	REALISASI - PENERIMAAN		% S/D BULAN LALU	S/D BULAN INI	%	KET.
				S/D BULAN LALU	BULAN INI				
5	1.20.03.00.30.4.2.1.C1.05	BAGI HASIL BAGIAN PEMERINTAH PUSAT YANG DIKEMBALIKAN	2.455.535.208,00	-	32.103.284,00	1,31	32.103.284,00	1,31	
6	1.20.03.00.30.4.2.1.01.06	PENERIMAAN BUMN PEMUNGUTAN PBB	5.000.000.000,00	-	2.857.897.303,00	47,63	2.857.897.303,00	47,63	
		JUMLAH PENERIMAAN II.1.1 :	101.227.890.176,00	83.553.517.568,00	31.551.963.625,00	31,18	115.115.434.193,00	113,72	
II.1.2 :		BAGI HASIL BUKAN PAJAK/SUMBER DAYA ALAM :							
1	1.20.03.00.30.4.2.1.02.02	BAGI HASIL DARI PROVISI SUMBER DAYA HUTAN (PSDH)	229.869.500,00	60.936.105,00	77.431.364,00	33,68	138.367.469,00	60,19	
2	1.20.03.00.30.4.2.1.02.04	BAGI HASIL DARI IURAN TETAP / LANDRENT	150.000.000,00	-	-	-	-	-	
3	1.20.03.00.30.4.2.1.02.06	BAGI HASIL DARI PENERIMAAN PUNGUTAN PENGUSAHAAN PERIKANAN	1.272.777.274,00	149.898.967,00	37.538.164,00	2,95	187.437.131,00	14,73	
4	1.20.03.00.30.4.2.1.02.08	BAGI HASIL DARI PENERIMAAN SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI	24.774.144.000,00	15.931.618.727,00	10.590.928.130,00	42,75	26.522.546.857,00	107,06	
5	1.20.03.00.30.4.2.1.02.09	BAGI HASIL DARI PENERIMAAN SEKTOR PERTAMBANGAN GAS ALAM	39.189.719.000,00	26.980.450.303,00	11.728.256.899,00	29,93	38.708.707.202,00	98,77	
6	1.20.03.00.30.4.2.1.02.11	BAGI HASIL DARI PENERIMAAN SEKTOR PERTAMBANGAN UMINUM	2.774.759.231,00	3.276.233.630,00	1.537.250.045,00	55,40	4.813.483.675,00	173,47	
		JUMLAH PENERIMAAN II.1.2 :	68.391.259.001,00	46.399.137.732,00	23.971.404.602,00	35,05	70.370.542.534,00	102,89	
		JUMLAH PENERIMAAN II.1.1 :	169.619.149.177,00	129.952.655.300,00	55.533.368.227,00	32,74	185.486.023.527,00	109,35	
		( Bagi Hasil Pajak + Bagi Hasil Bulkan Pajak )	659.611.000.000,00	659.611.000.000,00	54.968.500.000,00	8,33	714.579.500.000,00	108,33	
	II.2	DANA ALOKASI UMINUM (DAU)							
		JUMLAH PENERIMAAN II.2 :	659.611.000.000,00	54.968.500.000,00	8,33		714.579.500.000,00	108,33	
	II.3	DANA ALOKASI KHUSUS :	8.387.000.000,00	7.602.419.819,00	5.801.200.000,00	69,17	13.403.619.819,00	159,81	
		JUMLAH PENERIMAAN II.3	8.387.000.000,00	7.602.419.819,00	5.801.200.000,00	69,17	13.403.619.819,00	159,81	

NO.	KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	TAR TET	REALISASI - PENERIMAAN		% S/D BULAN INI	%	KET.
				S/D BULAN LALU	BULAN INI			
<b>III. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SYAH :</b>								
1.20.03.00.4.3.3	III.1 DANA BAGI HASIL PIK DARI PROVINSI & PEMERINTAH DAERAH LAINNYA :							
1.20.03.00.4.3.3.01	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI :							
1 1.20.03.00.4.3.3.01.01	DANA BAGI HASIL DARI PAJAK KENDARAAN BERMOGOR	23.191.065.798,95	11.595.532.898,00	14.163.046.419,00	61,07	25.758.579.317,00	111,07	
2 1.20.03.00.4.3.3.01.02	DANA BAGI HSL DARI PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR	16.028.016,18	8.014.008,00	8.014.008,00	50,00	16.028.016,00	100,00	
3 1.20.03.00.4.3.3.01.03	DANA BAGI HASIL DARI BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOGOR	30.306.202.480,05	15.153.101.240,00	11.051.320.731,00	36,47	26.204.421.971,00	86,47	
4 1.20.03.00.4.3.3.01.05	DANA BAGI HASIL DARI PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOGOR	30.603.300.000,00	15.301.650.000,00	13.387.336.710,35	43,74	28.688.986.710,35	93,74	
5 1.20.03.00.4.3.3.01.06	DANA BAGI HASIL DARI PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH	118.264.000,00	559.132.000,00	559.132.000,00	472,78	1.118.264.000,00	94,57	
6 1.20.03.00.4.3.3.01.08	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI BAGIAN TAHUN LALU	17.337.553.191,23	-	17.337.553.191,23	100,00	17.337.553.191,23	100,00	
<b>JUMLAH PENERIMAAN III.1 :</b>								
1.20.03.00.4.3.4	III.2 DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS :	101.572.413.486,41	42.677.420.145,10	56.506.403.059,58	55,63	99.123.833.205,58	97,59	
6 1.20.03.00.4.3.4.01.03	DANA PENYESUAIAN :	14.000.000.000,00	-	14.000.000.000,00	100,00	14.000.000.000,00	100,00	
<b>JUMLAH PENERIMAAN III.2 :</b>								
<b>JUMLAH PENERIMAAN III (III.1 + III.2) :</b>								
		115.572.413.486,41	42.677.430.146,07	70.506.403.059,58	61,01	113.123.833.205,58	97,88	

KODE REKENING	JENIS ENERIMAAN	TARGET	REALISASI - PENERTIMAN		% S/D BULAN INI	%	KET.
			S/D BULAN LALU	BULAN INI			
1	I.1 PAJAK DAERAH	51.475.000.000,00	46.432.046.154,25	5.054.821.453,00	9,82	51.486.867.607,06	100,02
2	I.2 RETRIBUSI DAERAH	55.929.049.227,00	44.039.577.163,00	4.532.211.055,00	8,09	48.577.158.218,00	86,74
3	I.3 HASIL FENGELULUAN KEK / AAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	2.750.000.000,00	-	2.366.826.719,28	-	2.366.826.719,28	86,07
4	I.4 LAIN-LAIN PAD YANG SYAH	21.325.035.465,20	32.233.321.132,13	7.469.145.628,00	35,03	39.702.466.760,13	186,18
	JUMLAH PENERTIMAN PAD :	131.549.084.692,20	122.705.314.449,19	19.422.004.855,20	14,76	142.128.319.204,47	108,04
5	II.1 BAGI HASTI PAJAK / SUKAN PADA	165.619.449.177,00	129.952.655.300,00	55.533.368.227,00	32,74	185.486.023.527,00	109,35
6	II.2 DANA ALOKASI UMUM (DAU)	659.611.000.000,00	659.611.000.000,00	54.968.500.000,00	8,33	714.579.500.000,00	108,33
7	II.3 DANA ALOKASI KHUSUS	8.387.000.000,00	7.602.419.819,00	5.801.206.000,00	69,17	13.403.619.819,00	159,81
8	III LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SYAH	115.572.413.486,41	42.617.430.146,00	70.506.403.059,58	61,01	113.123.833.205,58	97,88
	JUMLAH PENERTIMAN PAD + (II.1 + II.2 + III) :	1.084.738.647.355,61	962.488.819.714,19	206.232.476.141,86	19,01	1.168.721.295.856,05	107,74



Dra. Hj. SUMARYAH, MZ, MM  
PERBINA-SUTAMA MUDA  
NIP.130805523



- TEMBUAN : KEPADA YTH :
- GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN
  - KEPALA BADAN PENGAWAS PROVINSI SUMATERA SELATAN
  - ASISTEN I BIDANG PEMERINTAHAN SETDA SUMATERA SELATAN
  - KEPALA BIRO KELIANGAN SETDA SUMATERA SELATAN
  - KEPALA BIRO PEMERINTAHAN UMUM SETDA SUMATERA SELATAN
  - KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
  - KEPALA PERWAKILAN II BPK PALEMBANG
  - KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG
  - KETUA KOMISI II DPRD KOTA PALEMBANG
  - INSPEKTUR KOTA PALEMBANG
  - KEPALA BAGIAN KELIANGAN KOTA PALEMBANG



**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**  
**DINAS KEBERSIHAN DAN PEMAKAMAN KOTA PALEMBANG**  
JALAN SUKARELA NO. 129 A KM. 7 TELP. 415130  
**PALEMBANG**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 800/2607 /DKP/2008

Kepala Dinas Kebersihan dan Pemakaman Kota Palembang, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Maryunani  
NIM : 22 2003 177  
Jurusan : Akuntansi

Memang benar yang bersangkutan telah selesai melakukan penelitian dan Pengambilan data di Dinas Kebersihan dan Pemakaman Kota Palembang untuk bahan penyusunan Skripsi

Demikian surat keterangan ini, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

An. KEPALA DINAS  
KABAG TATA USAHA  
DINAS KEBERSIHAN DAN PEMAKAMAN KOTA PALEMBANG  
PALEMBANG  
W. TABRANI, SE, MM  
Pembina  
Nip. 440021202



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS EKONOMI**

**JURUSAN**

JURUSAN MANAJEMEN (S1)  
JURUSAN AKUNTANSI (S1)  
MANAJEMEN PEMASARAN (D III)

**IZIN PENYELENGGARAAN**

: No 3450/D/T/2005  
: No 3449/D/T/2005  
: No 1611/D/T/2005

**AKREDITASI**

No 015/BAN-PT/Ak-VII/S1/VII/2003 (B)  
No 020/BAN-PT/Ak-IXI/S1/X/2005 (B)  
No 003/BAN-PT/Ak-IV/Dpi-III/V/2004 (B)

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu (0711) 511488 Facsimile 518018 Palembang 30263

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Hari / Tanggal	:	Kamis, 4 Agustus 2008
Waktu	:	08.00 WIB
Nama	:	<b>MARYUNANI</b>
NIM	:	22 2003 177
Jurusan	:	Akuntansi
Mata Kuliah Pokok	:	Akuntansi Pemerintahan
Judul Skripsi	:	<b>ANALISIS RENDAHNYA REALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI KEBERSIHAN/PERSAMPAHAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PALEMBANG</b>

**TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING  
SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN UNTUK MENGIKUTI WISUDA**

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	TGL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1.	Drs. Sunardi, SE, M.Si	Pembimbing I	19/8 - 08	
2.	Lis Djuniar, SE	Pembimbing II	19/8 - 08	
3.	M. Taufiq Syamsuddin, SE, Ak.,M.Si	Ketua Penguji	19/8 - 08	
4.	Rosalina Ghazali, SE.,Ak.,M.Si	Anggota Penguji I	19/8 - 08	
4.	Betri Sirajuddin, SE.,Ak	Anggota Penguji II	19/8 - 08	



Palembang, Agustus 2008

An. Dekan

Ketua Jurusan Akuntansi

Drs. Sunardi, SE, M.Si



**KARTU AKTIVITAS**  
**BIMBINGAN USULAN PENELITIAN**

جامعة محمدية بال珮琅城

NAMA MAHASISWA : MARYUNANI  
NIM : 22 2003 177  
JURUSAN : AKUNTANSI

PEMBIMBING  
KETUA : Drs. Sunardi, SE, M.Si  
ANGGOTA :

JUDUL USULAN PENELITIAN : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN RETRIBUSI KEBERSIHAN/PERSAMPAHAN DI KOTA PALEMBANG

NO	TGL/BULAN/TAHUN	MATERI KONSULTASI	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1	30 - 5 - 2008	Up			Perbaiki !
2					
3					
4					
5	10 - 5 - 2008	Rumus Algoritma	✓		
6	15 - 5 - 2008	Metlit	✓		
7	30 - 5 - 2008	Up	✓		
8					
9					
10					

Tanggal Seminar yang disepakati :

Di keluarkan : Palembang  
Pada Tgl

Daftar Mahasiswa Peserta Seminar  
Yang dibawa oleh Penakalah

No	Nama Mahasiswa	NIM	Tanda Tangan
1	M. ABDUL FITRI, S.P.	22 2003.011	✓
2	Gaktiwan Ilhami	22. 2003.104	✓
3	Hilmi wati	22. 2003.103	✓
4	Fitriana Sari	22. 2003.218	✓
5	TRI Destiana	22. 2003.181	✓
6	Melizar. Saputra	22. 2003.180	✓
7	VINA Maria Sun'	22. 2003.066	✓
8	Ioma Fathona	22. 2003.068	✓
9	GINTA MAANDARI ADIL	22. 2003.030	✓
10			



**CATATAN :**

- Usulan Penelitian di Seminarkan setelah mendapat persetujuan dari Anggota dan Ketua Pembimbing
- Kartu Bimbingan Skripsi akan diberikan setelah Seminar dan Perbaikan Usulan Penelitian.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA	MARYUNANI	PEMBIMBING
NIRM/NIM	: 22 2003 177	1. Drs. Sunardi, SE, M.Si
JURUSAN	: AXUNTANSI	2. Lis Djuniar, SE
JUDUL SKRIPSI	ANALISIS RENDAHNYA REALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI KEBERSIHAN PERSAMPAHAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PALEMBANG	

NO.	TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1	27 - 3 - 2008	Bab I			Parbaiki!
2	27 - 3 - 2008	Bab II			Parbaiki!
3	27 - 6 - 2008	Bab III			Parbaiki!
4	3 - 7 - 2008	Bab IV			Acc
5	3 - 7 - 2008	Bab V			Acc
6	3 - 7 - 2008	Bab VI			Acc
7	23 - 7 - 2008	Bab I - ✓			Parbaiki!
8	20 - 7 - 2008	Bab I - ✓			Acc
9	20 - 7 - 2008	Bab I - ✓			Acc..
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

### CATATAN

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan Skripsi,  
6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan

Di keluarkan di : Palembang  
Pada tanggal : 18 / 06 / 2008

a.n. Dekan

Jurusan,



Drs. Sunardi, M. Si

## **BIODATA PENULIS**

Nama : **MARYUNANI**  
NIM : **22 2003 177**  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat / Tanggal Lahir : Palembang / 25 Maret 1984  
Alamat : Jalan Lomba Jaya Gang Harapan RT. 24  
No. 1560 Sekip Bendung Palembang  
  
Nama Orang Tua  
1. Ayah : Rikuan Yakub  
2. Ibu : Rusdiana  
Alamat Orang Tua : Jalan Lomba Jaya Gang Harapan RT. 24  
No. 1560 Sekip Bendung Palembang

Palembang, 23 Juli 2008

Penulis,

**MARYUNANI**



FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Isfani dan Uggasul

SERTIFIKAT

Nomor : 1001/J-10/FE-UMP/VII/2008

سُلْطَانِي  
الْمُهَمَّادِيَّةِ  
الْعَالِيَّةِ

Diberikan Kepada

Maryunani

NIM : 222003177

Jurusan : Manajemen  
Akuntansi

Yang dinyatakan LULUS Membaca dan Hafalan Al-Qur'an  
di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang  
*Dengan Predikat Cukup Memuaskan*  
Palembang, 11 Rajab 1429 H

14 Juli 2008 M

Alin Dekan  
Pembantu Dekan IV,

Drs Antoni  
NBM: 784955



# DAFTAR NILAI

NO	Nama Surat	Scor Penilaian	NO	Nama Surat	Scor Penilaian	NO	Nama Surat	Scor Penilaian
1	An - Nas	75	10	Al - Fiil	60	19	Al - Alaq	60
2	Al - Faq	75	11	Al - Humazah	60	20	At - Tiin	60
3	Al - Ikhlas	80	12	Al - Ashr	80	21	Al - Insyirah	60
4	Al - Lahab	80	13	At - Takatsur	60	22	Ad - Dhuhra	60
5	An - Nashr	60	14	Al - Qari'ah	80	23	Al - Lail	60
6	Al - Kafirun	80	15	Al - Adiyah	60	24	Asy - Syams	60
7	Al - Kautsar	80	16	Al - Zalzalah	60	25	Al - Balad	60
8	Al - Ma'un	60	17	Al - Baiyinah	60	26	Al - Fajr	60
9	Quraisy	60	18	Al - Qadar	60	Total III	480	
Total I	650		Total II	580	Total I + II + III	1710	Cukup Memuaskan	
<b>Nilai Rata-Rata</b>	<b>65,8</b>		<b>Predikat</b>					

Komponen Nilai :

- 88 - 100 Sangat Memuaskan
- 74 - 87 Memuaskan
- 60 - 73 Cukup Memuaskan

